

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan diklat secara umum

1. Pembahasan

Penerapan konsep diklat berbasis kompetensi dalam diklat kejuruan pada sebagian SMK Model umumnya baru nampak dalam bidang perencanaan, yang telah menggunakan standar kompetensi sebagai acuan dalam perencanaan, tetapi sebagian faktor pendukung masih belum memadai. Hal seperti ini kerap kali terjadi di SMK lain di Indonesia, yang hanya menonjolkan faktor dokumentasi dan formalitas tetapi meninggalkan esensi yang sebenarnya, serta maksud dan tujuan dari adanya perencanaan tersebut. Padahal dengan adanya perencanaan yang tertulis ini diharapkan akan dapat dilaksanakan di lapangan. Dan seringkali juga terjadi, walaupun perencanaan sudah mengacu pada standar kompetensi tetapi umumnya perencanaan terlihat belum dilakukan secara tertib karena pada beberapa sekolah masih banyak hal-hal yang direncanakan ternyata tidak dapat dilaksanakan, dan selain itu terdapat sekolah dalam mencari dokumen untuk suatu kegiatan seringkali menemui kesulitan akibat kurang tertibnya administrasi sekolah. Ketertiban dalam pendokumentasian ini sebenarnya sangat diperlukan karena ini merupakan landasan untuk menuju kepada ketertiban bidang-bidang lainnya. Bila ketertiban dalam pendokumentasian ini dapat terlaksana maka akan memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan untuk menggunakan dokumen yang ada tersebut. Perencanaan kegiatan diklat seharusnya tidak hanya bersifat temporer dan jangka pendek saja, tetapi harus mencakup perencanaan jangka panjang yang merupakan perencanaan strategik, sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi secara mendasar dan benar-benar menyentuh akar permasalahan. Seperti keharusan

adanya faktor pendukung yang sesuai kebutuhan, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang baik. Pengadaan maupun penataan faktor pendukung tidak akan dapat diatasi secara temporer saja, tetapi harus benar-benar disiapkan secara terencana dan mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang kemungkinan terjadi di lapangan. Sebagai implementasi dari perencanaan maka dilakukan pelaksanaan di lapangan, ternyata pada pelaksanaannya diklat pada keempat SMK Model tersebut umumnya belum sepenuhnya mengacu pada standar kompetensi. Padahal acuan terhadap standar ini sangat penting bagi diklat yang berbasis pada kompetensi kejuruan karena hal ini menjadi salah satu ciri terselenggaranya diklat berbasis kompetensi. Apabila dalam perencanaan telah dituliskan suatu kegiatan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan maka ini menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi dalam mewujudkan perencanaan yang ada. Seharusnya sedapat mungkin pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan rencana yang ada, sehingga ada pegangan dalam mempertanggungjawabkan suatu kegiatan. Dan apabila ada suatu hambatan sehingga rencana tidak dapat dilaksanakan maka hal ini harus ada sebuah alasan yang jelas, mengapa tidak dapat dilaksanakan. Mungkin saja suatu perencanaan tidak dapat dilaksanakan karena pada saat merencanakan tidak diperoleh informasi yang jelas tentang kondisi lapangan, atau bisa terjadi adanya prediksi yang salah tentang situasi yang akan dihadapi. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana ini sebenarnya dapat diatasi dengan adanya pengawasan yang kontinyu dari pimpinan sekolah. Dengan adanya pengawasan yang kontinyu ini maka apabila dalam pelaksanaan di lapangan terjadi penyimpangan dari rencana maka akan segera terdeteksi untuk kemudian diluruskan kembali atau dicarikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

Pimpinan sekolah tempat dilakukannya penelitian umumnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan penerapan diklat berbasis kompetensi, ini dibuktikan dengan

keseriusannya untuk melengkapi dan merawat fasilitas pembelajaran, walaupun hambatan terjadi karena kurangnya dana. Faktor komitmen pimpinan sangat menentukan keberhasilan dalam mengelola diklat, seperti terlihat pada SMKN 4 Jakarta dan SMK YPPT Garut. Apabila kepala sekolah memiliki komitmen yang kuat terhadap keberhasilan program yang dibuktikan dengan upaya nyata seperti kemauan untuk melengkapi dan merawat fasilitas, perencanaan matang yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan yang baik, maka sekolah tersebut akan memperoleh keberhasilan dalam mengelola diklatnya. Hal ini dapat dilihat bahwa pengelolaan diklat berbasis kompetensi pada sekolah yang pimpinannya memiliki komitmen tinggi memiliki tingkat penerapan prinsip diklat berbasis kompetensi yang lebih tinggi walaupun prinsip belajar tuntas belum sepenuhnya dilakukan. Selanjutnya dengan peran kepala sekolah yang kuat ini diklat berbasis kompetensi dapat dilakukan dengan lebih baik karena dari segi guru, kondisi peralatan/mesin, dan kerja sama industri akan lebih baik. Pada SMK yang penuh dengan komitmen untuk menerapkan konsep diklat berbasis kompetensi, ternyata pembelajaran di industri berupa prakerin dilakukan secara intensif pula pada industri yang memiliki peralatan lengkap untuk mendukung keberhasilan diklat berbasis kompetensi. Komitmen pimpinan sekolah kelompok ini sangat terlihat dalam hal perawatan fasilitas belajar maupun dalam melengkapi sarana belajar lainnya. Apabila semua warga memiliki komitmen maka perencanaan diklat akan dilakukan dengan baik pula serta dalam pelaksanaannya tidak banyak menyimpang dari rencana yang telah disusun.

Masalah komunikasi antara pimpinan dan bawahan juga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan, karena kalau kurang adanya komunikasi maka program-program pimpinan akan kurang dipahami oleh stafnya. Dari temuan yang ada terlihat adanya sekolah yang memiliki komunikasi yang baik tetapi ada pula komunikasi yang belum

berjalan dengan baik. Pada SMK yang kurang ini komunikasi antara pimpinan dan bawahan kurang berjalan dengan baik sehingga diklat kurang terkoordinasi dengan baik pula, seringkali terjadi beberapa keputusan sudah diambil namun dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada hasil keputusan dan kadang tidak dilaksanakan. Hal seperti di atas sebenarnya dapat diatasi bila kendala atas pelaksanaan keputusan segera dijelaskan oleh kepala sekolah kepada guru, tetapi apabila kepala sekolah justru mengambil jarak terhadap guru maka hal ini akan dapat memperburuk situasi karena akan lebih memperlebar jurang pemisah yang berakibat komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Apabila komunikasi antara pimpinan dan para guru dapat berlangsung akrab tanpa meninggalkan batasan kesopanan, maka para pembantu kepala sekolah dan juga para guru akan menjadi termotivasi dan serius dalam mengembangkan diklat berbasis kompetensi.

Jadi pendekatan kepala sekolah yang sangat persuasif kepada bawahannya memegang faktor penting dalam keberhasilan yang diraih SMK dalam menata sekolahnya sehingga menjadi tertib, berdisiplin dan dana yang ada secara efektif dan efisien digunakan untuk pemeliharaan fasilitas yang dimiliki sekolah. Komunikasi antara pimpinan sekolah dengan para guru yang berjalan dengan baik dan cukup terbuka harus selalu diupayakan sehingga program-program sekolah cukup dipahami oleh para guru, dan akhirnya akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Prinsip-prinsip pengelolaan seperti adanya ketertiban, kejelasan perintah/informasi, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya akan sangat menentukan keberhasilan program. Seperti terlihat pada SMKN 4 Jakarta dan SMK YPPT Garut, dengan adanya ketertiban dalam penataan gedung, lingkungan, kedisiplinan dan ketatausahaan maka proses diklat menjadi lancar dan berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya kejelasan informasi/perintah dari atasan kepada bawahan maka bawahan sebagai pelaksana

akan menjadi lebih paham dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi prinsip pengelolaan seperti di atas harus selalu diupayakan, walaupun diakui akan banyak tantangan karena melibatkan personil yang terdiri dari manusia yang masing-masing memiliki karakteristik individu yang berbeda sehingga harus dilakukan upaya untuk memotivasi personil tersebut.

Dalam hal pengawasan, pada sebagian sekolah telah dilakukan dengan baik walaupun ada satu sekolah yang masih belum menerapkan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Pada SMK yang memiliki pengawasan lemah ternyata kedisiplinan guru terlihat kurang, yang dapat dilihat dari mulainya proses pembelajaran yang kebanyakan mundur dari waktu yang telah ditentukan walaupun siswanya telah siap di kelas. Pada SMK yang melakukan pengawasan dengan baik, walaupun tidak ketat, ternyata banyak kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang dari perencanaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang sesuai dengan rencana itu dapat dilaksanakan karena fungsi pengawasan telah berjalan walaupun tidak dilakukan secara ketat. Jadi faktor pengawasan ini sangat penting untuk memantau apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum dan apabila terjadi hambatan dapat segera dilakukan perbaikan tanpa harus meninggalkan perencanaan sepenuhnya. Jadi dengan adanya konsistensi terhadap program sekolah, dan adanya pengawasan yang baik maka di masa depan diharapkan akan memperoleh hasil yang optimal.

Dalam mengelola diklat beberapa pimpinan sekolah kurang serius dalam usaha memperbaiki fasilitas pembelajaran yang ada, terlebih lagi dalam hal penambahan fasilitas, yang terlihat dari kondisi gedung dan peralatan yang kurang terawat. Hal tersebut kendala utamanya adalah masalah pembiayaan yang terlihat dari pembiayaan untuk bahan praktek yang umumnya masih kurang, sehingga siswa tidak dapat melakukan latihan-latihan secara

optimal, hal ini juga dapat dilihat dari keluhan para guru dalam hal ketersediaan bahan praktek. Masalah pembiayaan ini memang merupakan masalah rutin dan klasik yang terjadi di banyak sekolah, padahal apabila dilihat dari komponen biaya yang ada untuk bahan ini cukup tinggi, yaitu dari siswa sendiri telah membayar sumbangan pembinaan pendidikan dan biaya bahan praktek, selain itu dari pemerintah (bagi sekolah negeri) sudah dianggarkan sejumlah biaya untuk bahan praktek. Dengan melihat hal ini maka dapat dipahami bahwa permasalahannya adalah pemanfaatan dana tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sebenarnya juga dapat diatasi dengan adanya pengawasan dari pihak lain, termasuk orang tua siswa. Tetapi karena kelemahan pengawasan maka hal tersebut sulit untuk diatasi, jadi pada masa depan masalah pengawasan ini harus dijadikan faktor prioritas dalam melaksanakan kegiatan.

Kembali pada masalah pelaksanaan diklat yang dapat dikatakan bahwa pengelolaan diklat berbasis kompetensi pada keempat SMK Model penyelenggara diklat berbasis kompetensi tersebut pada umumnya baru pada perencanaan saja yang mengacu pada standar kompetensi kejuruan, sedangkan dalam pelaksanaan seperti proses pembelajaran, belum sepenuhnya mengacu pada standar kompetensi tersebut. Ternyata ditemukan hal lain bahwa meski dalam pelaksanaan ada penyimpangan dari rencana, atau dengan kata lain tidak mengacu pada prinsip diklat berbasis kompetensi, tetapi apabila raw input/siswanya lebih baik kualitasnya serta didukung oleh sumber daya dan proses yang baik maka hasilnya akan lebih baik juga. Hal ini terlihat pada kenyataan, bahwa pada SMK negeri jumlah kelulusan uji kompetensi (yang memperoleh sertifikat kompetensi dari MPKN) lebih banyak dari pada SMK swasta, walaupun SMK swasta tersebut dikelola dengan baik serta memiliki peralatan yang cukup memadai seperti pada SMK YPPT Garut. Jadi selain penerapan prinsip diklat berbasis kompetensi yang dalam proses pembelajarannya harus

dengan pendekatan belajar tuntas, harus diperhatikan juga masalah kemampuan intelektual para siswa, sehingga masalah seleksi ini menjadi hal yang penting supaya diklat dapat berjalan dengan baik dan mencapai standar yang telah ditentukan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya jelas terlihat pada dua SMK tersebut dengan adanya biaya untuk menata lingkungan, merawat fasilitas bengkel maupun mencukupi kebutuhan praktek siswa. Jadi apabila fungsi-fungsi administrasi pendidikan diikuti, yaitu dilakukannya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diikuti dengan penerapan prinsip pengelolaan mengenai ketertiban, kejelasan, efektivitas dan efisiensi maka akan menjadi jaminan bahwa suatu program akan tercapai tujuannya. Terwujudnya ketertiban dalam bentuk tertib administrasi diklat serta kedisiplinan siswa dan guru yang terlihat dalam kehidupan sekolah sehari-hari akan sangat membantu dalam mencapai tujuan peningkatan mutu lulusan melalui penerapan diklat berbasis kompetensi.

Pada sisi lain apabila azas-azas pengelolaan tadi tidak diperhatikan, maka walaupun didukung oleh kelengkapan fasilitas seperti pada SMKN 2 Serang, justru menimbulkan masalah dalam merawat fasilitas praktek yang dimiliki. Juga seperti pada SMK Texmaco Karawang, yang sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diklat berbasis kompetensi karena hubungan khusus dengan industri, justru kurang berhasil dalam mengembangkan dirinya karena kurang adanya ketertiban dalam pelaksanaan diklat, yang terlihat dari kurang tertibnya lingkungan, kurang tertibnya ruang teori serta kurang tertib dalam ketatausahaan sekolah maupun pendokumentasian kegiatan. Dan yang paling terlihat kurang tertibnya pengelolaan adalah pada kegiatan siswa pada saat yang seharusnya belajar justru berada di luar kelas karena guru terlambat masuk dan sebagainya yang menunjukkan kurang tertibnya pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut.



2. Penyempurnaan pola pengelolaan diklat yang dapat dilakukan

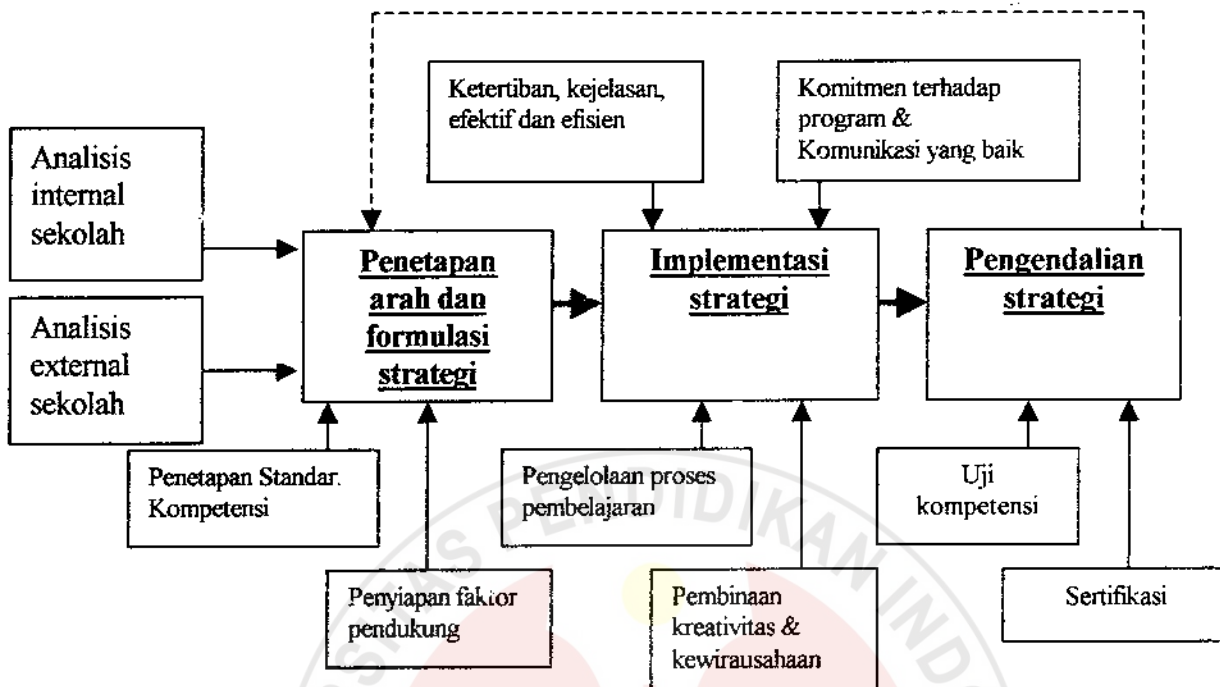
Supaya diklat berbasis kompetensi kejuruan ini dapat berhasil dengan baik, maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang merupakan prasyarat tercapainya tujuan yaitu meningkatkan kompetensi siswa melalui diklat berbasis kompetensi. Tindakan-tindakan nyata maupun pola pengelolaan diklat sebaiknya mengikuti pola sebagai berikut :

- a. Seorang pimpinan tidak bisa berpikir sempit tetapi harus berpikir secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek lingkungan, karena dengan adanya informasi yang akurat tentang kondisi internal maupun eksternal sekolah maka perencanaan akan dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Faktor internal sekolah yang meliputi fasilitas belajar, bahan ajar, media, guru dan personil pendukung, serta prasana harus dapat diketahui betul kondisinya sehingga dapat diketahui kekurangannya untuk mencapai tujuan diklat. Selain itu faktor eksternal sekolah yang meliputi dunia usaha/industri serta instansi terkait harus dapat diketahui sejauh mana hubungan yang telah terjalin dan sejauh mana telah dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah.
- b. Dengan diketahuinya faktor-faktor tadi maka dapat dilakukan penentuan arah diklat serta dituangkan dalam formulasi strategi atau perencanaan diklat yang akurat dalam rangka mengantisipasi timbulnya perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya barulah dilakukan tindakan-tindakan sebagai implementasi dari perencanaan yang dilakukan dengan dilandasi oleh beberapa hal, antara lain :
 - Harus ada komitmen pimpinan dan anggota organisasi/warga sekolah untuk meningkatkan mutu tamatan melalui diklat berbasis kompetensi kejuruan. Dengan adanya komitmen ini maka pemimpin dan stafnya akan secara konsisten melakukan tindakan-tindakan nyata guna mencapai tujuan tersebut, misalnya meningkatkan

kompetensi guru, melengkapi dan merawat fasilitas yang dimiliki, memantau proses pembelajaran serta hasil proses pembelajaran tersebut.

- Pelaksanaan kegiatan harus diupayakan supaya sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan, jadi jangan sampai ada kegiatan yang menyimpang jauh dari tujuan semula. Kalaupun dalam pelaksanaan ternyata ada kendala maka penyesuaian yang dilakukan jangan sampai merubah tujuan. Dalam pelaksanaan ini juga harus ditekankan prinsip ketertiban, kejelasan, efektivitas dan efisiensi dalam tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan hasil perencanaan.
 - Dalam pelaksanaan diklat ini harus ditekankan adanya pembinaan kreativitas dan kewirausahaan terhadap siswa, untuk mengatasi kemungkinan siswa yang hanya terpaku pada standar kompetensi tanpa memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah maupun tanpa memiliki semangat berwirausaha, padahal mereka memiliki potensi untuk berwirausaha.
 - Adanya komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan para guru serta staf yang lain sehingga program-program yang telah dirancang oleh pimpinan sekolah dipahami oleh warga sekolah. Selain itu kepala sekolah harus bersikap responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para guru atau staf lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Pengawasan dalam kaitannya dengan pengendalian strategi harus dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, dengan adanya pengawasan ini apabila terjadi penyimpangan dari rencana atau apabila ditemukan kendala maka akan segera dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian secepat mungkin sehingga organisasi mampu bertahan dari perubahan-

perubahan yang terjadi di luar organisasinya. Selanjutnya dengan pengawasan ini pula akan dapat memberikan masukan bagi perencanaan yang akan datang.



Gbr. 6 : Alur pengelolaan diklat di SMK

B. Perencanaan Diklat Kejuruan

1. Penetapan Standar Kompetensi Kejuruan

a. Pembahasan

Pada ke empat SMK yang dijadikan model penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi kejuruan ini standar yang menjadi acuan adalah Standar Kompetensi kejuruan yang disusun oleh sebuah organisasi kerjasama antara Indonesia dan Australia yang disebut IAPSD (*Indonesian Australian Partnership for Skill Development*) yang diperuntukkan bagi Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional yang merupakan bagian dari Kadin. Untuk program keahlian Mesin Perkakas Standar Kompetensi yang digunakan adalah standar kompetensi MPKN bidang industri logam dan mesin. Standar tersebut mulai diterapkan

dari tahun 2001 sejak adanya program SMK Model penyelenggara diklat berbasis kompetensi, jadi sebelumnya yang menjadi acuan hanyalah Kurikulum SMK Edisi tahun 1999. Penetapan standar ini telah dilakukan dengan benar, karena seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah standar yang menjelaskan tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan di tempat kerja. Bentuk dari standar kompetensi adalah berupa kinerja di tempat kerja dengan pendefinisian pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja dan penerapan yang dibutuhkan untuk semua pekerjaan dalam industri atau perusahaan. Dengan demikian suatu Standar Kompetensi menjelaskan dan menentukan apa yang seharusnya mampu dilaksanakan oleh seseorang di tempat kerja. Jadi apa yang sudah dilakukan sekolah dengan menggunakan standar yang dihasilkan oleh IAPSD dan sekarang menjadi milik MPKN (Standar Kompetensi Nasional) merupakan sebuah kemajuan yang cukup berarti. Industri memang sudah seharusnya memiliki standar karena dengan Standar Kompetensi ini maka akan memberikan sebuah cara bagi profesi/industri/perusahaan untuk menetapkan atau menentukan syarat-syarat apa yang dibutuhkan seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaan di tempat kerjanya. Selain itu Standar Kompetensi memberikan acuan bagi sistem pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan menyajikan program diklat yang berhubungan dengan kebutuhan tempat kerja. Standar Kompetensi juga memberikan acuan yang memastikan bahwa sistem tersebut menjelaskan apa yang diminta atau diinginkan oleh industri/perusahaan. Masalah standar kompetensi kejuruan yang dipakai ini dapat dikatakan berlaku secara nasional, karena standar tersebut disusun oleh sebuah tim di IAPSD yang memang melibatkan pihak industri maupun lembaga pendidikan namun dari segi materi merupakan adaptasi (sebagian besar merupakan adopsi) dari Standar Kompetensi yang berlaku di Australia. Selain itu sekarang ini telah ada pengesahan dari

pihak Kadin tentang pemberlakuan standar kompetensi tersebut secara nasional, yang berarti standar yang digunakan merupakan standar kompetensi nasional untuk bidang metal/mesin perkakas. Hanya masalahnya apakah pihak industri sebagai perusahaan mau mengakui standar tersebut sebagai standar milik industri di Indonesia. Memang sebelum standar kompetensi yang sekarang ini terbit, pihak Depdiknas dan Kadin pernah menerbitkan buku Standar Kompetensi untuk bidang keahlian mesin industri, namun ternyata sampai saat ini belum digunakan sebagai acuan walaupun telah disebar di banyak SMK. Maka pihak pemerintah sendiri dan Kadin harus mensosialisasikan hasil ini ke semua industri yang relevan, dengan adanya penerimaan oleh pihak industri maka diharapkan standar kompetensi ini dapat berlaku secara nasional pada semua industri. Apabila ada industri yang merasa kurang sesuai dengan standar yang ada maka sebenarnya sebuah industri dapat membangun standar yang khusus bagi industri tersebut, yang di masa depan dapat diakomodasikan ke dalam standar kompetensi yang berlaku secara nasional tersebut. Yang paling utama sebenarnya adalah adanya pengakuan asosiasi profesi terhadap standar tersebut, tetapi masalahnya saat ini untuk lingkup mesin industri masih belum ada asosiasi profesi yang berlaku secara nasional untuk tingkat teknisi, yang ada barulah tingkat insinyur. Asosiasi yang ada sekarang ini masih bersifat lokal dan cenderung sebagai asosiasi perusahaan yang sejenis, bukan asosiasi profesi keahlian tertentu yang dikuasai seseorang.

Selain hal di atas terdapat permasalahan atau kesenjangan dalam penggunaan standar kompetensi, hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan uji kompetensi di SMK. Sekarang ini untuk program keahlian Mesin Perkakas pada beberapa SMK, uji kompetensi dilakukan oleh Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta. Padahal belum jelas acuan Standar Kompetensi mana yang menjadi acuan uji kompetensi dari ATMI ini, apakah

Standar Kompetensi dari MPKN atau standar kompetensi milik ATMI sendiri. Pelaksanaan uji kompetensi pada tahun ajaran 2001/2002 untuk SMKN 4 Jakarta program keahlian Mesin Perkakas juga dilakukan oleh ATMI. Pada SMKN 2 Serang uji kompetensi dilakukan oleh industri di sekitar Serang demikian juga untuk SMK YPPT Garut. Untuk SMK Texmaco Karawang uji kompetensi dilakukan oleh pihak staf produksi PT Texmaco. Jadi dari uji kompetensi yang dilakukan selama ini dapat dilihat bahwa Standar Kompetensi yang dijadikan acuan sebenarnya belum ada, dan sekarang ini pada model penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi, Standar Kompetensi yang dijadikan acuan adalah Standar Kompetensi dari MPKN. Hal ini sebenarnya dilakukan karena belum adanya acuan yang jelas mengenai standar yang ada dan hal ini memang sudah benar dilakukan, hanya masalahnya sejauh mana pengakuan pihak industri terhadap Standar Kompetensi MPKN ini. Sejangkau ini untuk Standar Kompetensi versi MPKN, pihak industri yang telah mengakui dan memanfaatkannya adalah PT. Texmaco dan PT. Pindad. Untuk di PT. Texmaco kompetensi karyawannya sudah mulai mengacu pada Standar Kompetensi dari MPKN ini, terutama untuk bidang pengerjaan logam/mesin industri. Jadi langkah yang diambil pada 4 SMK Model sudah benar, yaitu menggunakan standar kompetensi nasional sebagai acuan diklat yang dilakukan walaupun standar tersebut masih butuh sosialisasi untuk dapat diakui oleh asosiasi industri/profesi yang berskala nasional.

b. Pola penetapan standar kompetensi yang dapat dilakukan

Untuk pengembangan selanjutnya pada ke empat SMK Model ini yang penting harus ada standar kompetensi yang secara konsisten dijadikan acuan bagi perencanaan diklat dan pelaksanaan diklat termasuk uji kompetensinya. Sebenarnya walaupun standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan belum merupakan standar nasional, hal itu tidak

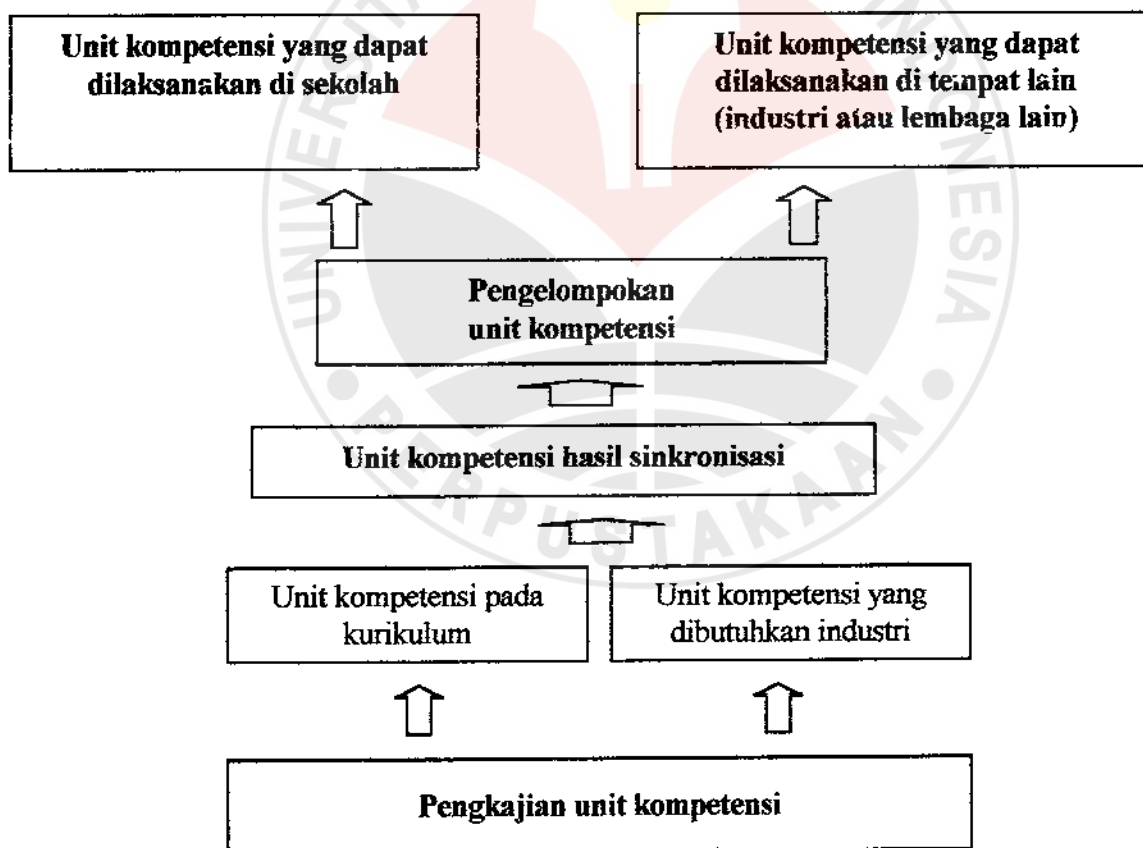
menjadi masalah sepanjang standar yang ada tersebut memang telah diakui oleh kebanyakan industri. Yang menjadi masalah adalah apabila standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan diklat ternyata berbeda dengan standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan uji kompetensi. Sehingga bila standar kompetensi yang akan digunakan sebagai acuan adalah dari MPKN, maka yang digunakan sebagai acuan pengujian juga standar kompetensi dari MPKN. Demikian juga bila standar yang digunakan adalah dari ATMI maka acuan pengujian juga harus dari ATMI tersebut.

Dari acuan kompetensi yang ditetapkan pada keempat SMK Model tersebut terlihat adanya unit-unit kompetensi yang umumnya belum dijadikan acuan karena sekolah tidak memiliki peralatan penunjangnya, yaitu :

- 1) Mengefrais komplek, meliputi keterampilan membuat roda gigi lurus dan heliks.
- 2) Menggerinda, meliputi jenis keterampilan menggerinda permukaan, menggerinda silinder dan menggerinda perkakas.
- 3) Memprogram mesin CNC, meliputi jenis keterampilan memprogram mesin bubut CNC dan memprogram mesin frais CNC.
- 4) Mengoperasikan mesin CNC, meliputi jenis keterampilan mengoperasikan mesin bubut CNC dan mesin frais CNC.

Sebenarnya sekolah tetap dapat menggunakan acuan unit kompetensi seperti di atas tetapi pelaksanaan pembelajarannya dilakukan di tempat lain, misalnya industri, perguruan tinggi ataupun lembaga diklat lain yang memiliki peralatan mesin frais yang lengkap, gerinda datar atau silinder dan mesin CNC. Jadi pola *outsourcing* dan kerjasama dengan pihak lain harus mulai diterapkan di sekolah, karena pada saat sekarang ini pola-pola seperti itu sudah banyak diterapkan di beberapa industri. Pembiayaan untuk mempelajari unit kompetensi yang tidak ada peralatannya di sekolah dapat dilakukan sendiri oleh orang tua siswa, atau

dapat dilakukan pola magang pada sebuah industri yang memiliki peralatan dimaksud sehingga biaya dapat ditekan seminimal mungkin supaya tidak memberatkan orang tua siswa. Pola penetapan unit kompetensi yang diambil dari standar kompetensi dapat dilakukan dengan cara melakukan analisa unit kompetensi mana yang dapat dipelajari di sekolah dan unit kompetensi mana yang dapat dipelajari di industri. Jadi walaupun prioritas adalah unit kompetensi yang dapat dipelajari di sekolah tetapi bagi siswa yang memiliki kesempatan untuk mempelajari di tempat lain/ luar sekolah maka dapat mengacu pada unit kompetensi yang telah disiapkan untuk dipelajari di luar sekolah tersebut. Pola penetapan dan pengelompokan unit kompetensi dapat dilakukan seperti gambar di bawah ini.



Gbr. 7 : Pola penetapan unit kompetensi

2. Penyiapan faktor pendukung diklat kejuruan

a. Pembahasan

1) Pengembangan kurikulum

Pada semua SMK Model penyelenggara diklat berbasis kompetensi telah dilakukan analisis kompetensi yang diajarkan, dan untuk program keahlian Mesin Perkakas pada umumnya melakukan hal yang sama. Analisis kompetensi semua dimulai dari sinkronisasi antara kurikulum SMK Edisi Tahun 1999 dengan Standar Kompetensi MPKN. Yang patut disayangkan dalam proses sinkronisasi kurikulum ini dilakukan tanpa melibatkan pihak industri, padahal hal tersebut sangat penting supaya ada kesesuaian antara pihak industri dengan pihak sekolah dalam menterjemahkan arti kompetensi pada standar yang ada. Pengembangan kurikulum diklat yang mengacu pada standar kompetensi dilakukan melalui kurikulum yang telah ditambah dengan hasil sinkronisasi, walaupun dari hasil yang ada pada umumnya tidak ada perbedaan antara kurikulum hasil sinkronisasi dengan kurikulum sebelum sinkronisasi, alasannya karena kompetensi pada kurikulum dengan kompetensi pada Standar Kompetensi MPKN tidak jauh berbeda, bahkan ada program diklat/mata pelajaran kejuruan yang sebenarnya tidak ada pada standar kompetensi. Perbedaannya terutama hanya pada penyusunan urutan keterampilan yang dipelajari.

Hambatan dalam pengembangan kurikulum diklat sebenarnya terletak pada kemauan guru, yaitu para guru umumnya sudah merasa cukup dengan adanya kurikulum edisi tahun 1999 seperti sekarang ini, sehingga merasa tidak perlu mengembangkan kurikulum lagi. Selain itu para guru belum memahami materi dan pelaksanaan seperti yang dikehendaki dalam kurikulum edisi tahun 1999. Jadi akhirnya belum ada dokumen

kurikulum alternatif yang memuat kompetensi-kompetensi terstandar yang relevan dengan tuntutan jabatan pekerjaan di lapangan. Pemahaman yang kurang dari para guru terhadap isi kurikulum dan implementasinya ini sebenarnya sangat disayangkan karena sebenarnya di sekolah telah tersedia buku pedoman pelaksanaan kurikulum, yang secara jelas menguraikan tentang bagaimana kurikulum berbasis kompetensi diimplementasikan.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah terutama pimpinannya, bahwa hasil analisis ini harus segera ditindaklanjuti. Paling tidak hasil analisis ini digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan program kerja (action plan) sekolah, jadi jangan setiap tahun dilakukan analisis kurikulum tetapi tidak ada tindak lanjutnya, karena hal ini justru akan melemahkan semangat guru untuk melakukan analisis pada waktu yang akan datang

Hal yang utama dalam analisis ini sebenarnya adalah analisis pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk mencapai kompetensi, seperti yang dipersyaratkan dalam diklat berbasis kompetensi. Kemudian hasil analisis pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja ini diwujudkan dalam bentuk proses pembelajaran atau penyajian diklat. Jadi seandainya diklat berbasis kompetensi ini diterapkan pada pelatihan di industri dan bukan di sekolah maka hasil analisis inilah yang digunakan sebagai kurikulum pelatihan. Namun karena diklat berbasis kompetensi ini diterapkan di sekolah dan di sekolah telah ada kurikulum maka yang perlu dilakukan adalah dilakukannya sinkronisasi kurikulum terhadap standar kompetensi yang menjadi acuan. Dalam hal penyusunan kurikulum kejuruan ini bisa saja tidak perlu menuliskan materi yang harus diajarkan di sekolah tetapi cukup menunjuk unit kompetensi yang harus dijadikan acuan di sekolah. Dengan adanya penetapan unit-unit kompetensi minimal yang harus dipelajari dan dikuasai siswa, maka akan dapat disusun kurikulum diklat oleh para guru sendiri di masing-masing sekolah atau

wilayah. Pada saat uji kompetensi maka yang dijadikan acuan adalah unit-unit kompetensi minimal yang harus dipelajari tadi. Dengan demikian ada keleluasaan bagi pihak sekolah dalam memberikan materi diklat, yang penting acuannya adalah unit kompetensi yang menjadi acuan atau telah ditetapkan oleh pihak pusat.

Selanjutnya pihak sekolah harus menyadari bahwa dalam sebuah diklat dibutuhkan adanya suatu struktur program yang lazim disebut dengan kurikulum diklat. Tetapi juga harus diingat bahwa kurikulum juga merupakan perencanaan yang menggabungkan serangkaian hasil belajar yang diinginkan dengan pengalaman belajar yang *relevan*, dan disusun ke dalam suatu urutan yang menjadi unit-unit modul atau mata pelajaran yang saling berkaitan. Jadi, di masa yang akan datang kurikulum yang disusun oleh pihak sekolah berdasarkan standar kompetensi adalah sebuah kurikulum yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan baik oleh peserta diklat atau siswa tentang suatu kegiatan pembelajaran. Jadi harus memuat aspek-aspek tujuan, materi (kompetensi), strategi pembelajaran dan metoda penilaian terhadap pencapaian kompetensi. Tujuan harus mengandung dua elemen, yaitu unjuk kerja dan kondisi. Isi kurikulum didasarkan pada analisis standar kompetensi. Jadi isi/materi harus dituliskan berdasarkan standar kompetensi industri atau dengan kata lain isi suatu kurikulum (GBPP) merupakan hasil identifikasi pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja yang dibuat terstruktur sehingga mudah untuk dituangkan ke dalam program diklat. Selain itu komponen yang harus ada di dalamnya adalah standar kompetensi, struktur program yang fleksibel, pengakuan pengalaman belajar, dan sistem penilaian terhadap unjuk kerja dan hasil kerja. Dalam kurikulum tersebut juga diperlukan penjelasan mengenai sistem akreditasi dan sertifikasi yang diperlukan.

gerinda silinder dan mesin gerinda perkakas serta mesin CNC. Dengan kondisi peralatan yang seperti itu maka akan sangat tidak mungkin mencapai semua kompetensi yang dituntut oleh kurikulum, oleh karena itu apa yang sudah dilakukan pada SMK Model juga sudah benar dengan memilih beberapa kompetensi yang dapat dicapai dengan peralatan seperti itu. Menurut pengarahannya pihak Direktorat Dikmenjur memang diharapkan kompetensi yang tidak dapat dipelajari di sekolah dapat dikuasai melalui praktek kerja industri, namun kenyataan yang ada hal tersebut sulit dilakukan kecuali pada SMK Texmaco Karawang. Dengan peralatan yang ada seperti sekarang ini maka kompetensi yang dapat dipelajari siswa adalah sebagai berikut :

- a) Pada SMKN 4 Jakarta pada program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, mengelas dasar, pemesinan umum, mesin bubut, mesin frais, mesin skrap, mesin gerinda permukaan, mesin gerinda silinder dan mesin gerinda perkakas.
- b) Pada SMK YPPT Garut untuk program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, mengelas dasar, pemesinan umum, mesin bubut dan mesin gerinda permukaan.
- c) Pada SMKN 2 Serang program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, pemesinan umum, mesin bubut dan mesin CNC.
- d) Pada SMK Texmaco Karawang program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, pemesinan umum, mesin bubut, mesin frais, mesin skrap dan mesin gerinda.

Karena adanya permasalahan atau hambatan dalam penyediaan fasilitas praktek ini maka perlu ditumbuhkan inisiatif dan kreativitas para guru untuk dapat memanfaatkan fasilitas

gerinda silinder dan mesin gerinda perkakas serta mesin CNC. Dengan kondisi peralatan yang seperti itu maka akan sangat tidak mungkin mencapai semua kompetensi yang dituntut oleh kurikulum, oleh karena itu apa yang sudah dilakukan pada SMK Model juga sudah benar dengan memilih beberapa kompetensi yang dapat dicapai dengan peralatan seperti itu. Menurut pengarahannya pihak Direktorat Dikmenjur memang diharapkan kompetensi yang tidak dapat dipelajari di sekolah dapat dikuasai melalui praktek kerja industri, namun kenyataan yang ada hal tersebut sulit dilakukan kecuali pada SMK Texmaco Karawang. Dengan peralatan yang ada seperti sekarang ini maka kompetensi yang dapat dipelajari siswa adalah sebagai berikut :

- a) Pada SMKN 4 Jakarta pada program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, mengelas dasar, pemesinan umum, mesin bubut, mesin frais, mesin skrap, mesin gerinda permukaan, mesin gerinda silinder dan mesin gerinda perkakas.
- b) Pada SMK YPPT Garut untuk program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, mengelas dasar, pemesinan umum, mesin bubut dan mesin gerinda permukaan.
- c) Pada SMKN 2 Serang program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, pemesinan umum, mesin bubut dan mesin CNC.
- d) Pada SMK Texmaco Karawang program keahlian Mesin Perkakas dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, pemesinan umum, mesin bubut, mesin frais, mesin skrap dan mesin gerinda.

Karena adanya permasalahan atau hambatan dalam penyediaan fasilitas praktek ini maka perlu ditumbuhkan inisiatif dan kreativitas para guru untuk dapat memanfaatkan fasilitas

yang ada secara optimal atau menambah beberapa fasilitas yang paling urgen. Selain itu perlu dilakukan standarisasi fasilitas belajar khususnya untuk kompetensi-kompetensi yang mendukung kegiatan praktek kerja bangku, mesin bubut dan mesin frais karena praktek tersebut merupakan praktek inti pada program keahlian Mesin Perkakas. Dengan kondisi peralatan yang kurang dari segi jumlah maka sistem pembelajaran harus disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada dengan cara merubah metoda dan jadwal pembelajaran. Pada ke semua SMK Model ini anggaran untuk bahan praktek sangat kurang, kecuali pada SMKN 4 Jakarta, untuk itu dalam pengadaan bahan praktek harus sehemat mungkin dan dicarikan sumber lain yang memungkinkan seperti melalui penjualan hasil praktek atau jasa lain yang dapat diberikan oleh sekolah. Sesuai dengan prinsip pembelajaran tuntas dalam diklat berbasis kompetensi maka seharusnya bahan praktek dapat diminta lagi oleh siswa bila terjadi kegagalan dalam praktek, namun dengan kondisi anggaran yang demikian maka pada program keahlian Mesin Perkakas dapat diatasi dengan cara seperti ukuran benda kerja dibuat besar sehingga bila terjadi kegagalan dalam ukuran maka ukuran tersebut dapat diperkecil dengan ketelitian yang sama, ada penggabungan beberapa keterampilan dalam satu benda kerja, dibuat barang yang dapat dijual atau merupakan pekerjaan pesanan dari luar sekolah/industri. Untuk mengatasi kekurangan jumlah mesin jika dibandingkan jumlah siswa maka dapat dilakukan usaha-usaha yang lebih optimal, diantaranya dengan menambah jam buka bengkel seperti yang dilakukan pada SMK YPPT Garut, jadi dengan cara ini waktu praktek bisa dilakukan sampai sore hari dengan pembagian kelompok praktek menjadi dua atau tiga kelompok sesuai dengan waktu yang akan digunakan untuk praktek. Hanya dalam hal ini harus ada kesediaan guru untuk bertambah jam mengajarnya, serta dari sisi pimpinan sekolah harus menyediakan dana untuk membayar kelebihan jam

mengajar guru (untuk SMK negeri) atau membayar honor mengajar tambahan tersebut (untuk SMK swasta).

Dalam hal penyediaan peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai standar kompetensi maka seharusnya mengacu pada kriteria unjuk kerja yang ada dalam standar kompetensi. Dalam beberapa hal sekolah tidak harus memiliki peralatan sendiri, karena untuk kompetensi tertentu dapat dilakukan pembelajaran di luar lembaga diklat melalui praktek kerja industri. Namun lembaga diklat seperti sekolah harus juga selalu mengupayakan ketersediaan peralatan utama untuk mencapai kompetensi inti (*core competency*) dari program keahlian tertentu, misalnya untuk Mesin Perkakas adalah mesin bubut, mesin frais, dan mesin gerinda serta peralatan kerja bangku. Juga untuk jumlah maka harus sesuai dengan rasio antara jumlah peserta diklat dan jumlah peralatan. Jadi untuk jumlah siswa 36 orang maka harus diupayakan satu siswa dapat menggunakan satu mesin, karena pada program keahlian mesin perkakas ini seharusnya menggunakan sistem stasiun kerja tunggal. Dalam hal pemenuhan kebutuhan peralatan ini sebaiknya juga harus diperhitungkan masalah pemeliharaan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran diklat. Selain itu perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja juga harus disiapkan karena bekerja pada mesin yang berputar merupakan suatu bahaya tersendiri. Hal ini juga tidak terlihat disediakan oleh 4 SMK Model tersebut, umumnya hanya melengkapi peralatan utama sedangkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja, seperti perlindungan untuk mata dan hidung, serta pelindung diri untuk pengelasan masih belum diperhatikan. Lebih lanjut lagi alat bantu dalam proses pengerjaan bahan mentah menjadi bahan setengah dan/atau jadi juga belum disediakan secara lengkap seperti meja pemutar pada mesin frais ataupun penyangga pada mesin bubut. Hal ini bila disediakan maka praktek akan lebih lancar, lebih mudah, lebih mempercepat dan lebih aman serta nyaman. Jadi yang perlu

diingat dalam hal peralatan ini harus diperhatikan bahwa peralatan utama yang dibutuhkan khusus untuk melayani kelompok kompetensi inti sebaiknya disediakan oleh sekolah dan bila dapat disediakan oleh industri pasangan maka harus ada jaminan bahwa pasti akan dapat terlaksana. Dengan demikian perhitungan kebutuhan alat sebaiknya didasarkan atas kebutuhan ideal dan disesuaikan dengan status peralatan, apakah akan digunakan secara perorangan atau kelompok.

3) Penyediaan Bahan Ajar

Bahan ajar sudah cukup banyak tersedia dipergustakaan, walaupun belum berupa modul individu, jadi bahan ajar berupa buku yang ada di perpustakaan tetap dapat digunakan sepanjang menunjang kompetensi yang dilatihkan, minimal sebagai buku referensi. Selanjutnya perlu disediakan buku referensi yang dibutuhkan untuk semua kompetensi yang diperlukan berdasarkan masing-masing program keahlian. Hal ini penting karena umumnya buku-buku terbitan baru yang ada di sekolah isinya sangat dangkal sehingga memerlukan buku referensi yang isinya cukup lengkap untuk dipelajari siswa.

Pada keempat SMK Model ini bahan ajar berupa modul individu sudah mulai disediakan oleh Direktorat Dikmenjur, walaupun baru sampai tingkat dua (program keahlian Mesin Perkakas). Bahan ajar yang tersedia tersebut dari sisi kompetensi yang dipelajari memang sudah tepat, namun yang patut dipertanyakan adalah apakah bahan ajar yang tersedia tersebut benar-benar digunakan dalam arti sesuai dengan urutan materi yang ada pada modul. Dengan melihat pada temuan yang ada pada keempat SMK tersebut terlihat bahwa buku yang tersedia di perpustakaan umumnya buku paket tahun 1976 dan sangat kurang buku referensi yang baik mutunya. Dengan demikian harus ada upaya dari sekolah untuk lebih melengkapi buku yang ada di perpustakaan baik dari segi jumlah

maupun jenis. Juga guru harus didorong untuk menulis bahan ajar untuk program diklat yang diajarkannya, untuk memotivasinya sebaiknya diberikan insentif bagi para penulis bahan ajar tersebut. Untuk penulisan modul ini sebaiknya dilakukan dalam waktu yang ditentukan berupa workshop atau lokakarya, karena bila dikerjakan di rumah maka akan sulit terpantau hasil penyusunan bahan ajar ini, apalagi adanya kesibukan mengajar di SMK swasta yang lain. Penulisan bahan ajar bagi siswa ini tidak perlu setebal buku pelajaran, tetapi yang penting materi inti pada tiap kompetensi harus ada dan diberikan daftar buku referensi sehingga dapat dijadikan pedoman bagi siswa untuk belajar lebih lanjut.

Yang perlu disadari oleh pimpinan sekolah maupun para guru bahwa bahan ajar ini memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, dan merupakan sumber pembelajaran. Supaya sebuah diklat dapat berhasil mencapai tujuan, salah satunya ditentukan oleh ketersediaan bahan ajar. Bila bahan ajar belum tersedia untuk semua unit kompetensi maka seharusnya dapat ditulis sendiri oleh guru dengan memperhatikan bahwa bahan ajar pada diklat berbasis kompetensi disusun berdasarkan hasil analisis standar kompetensi. Proses analisis ini dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap unit kompetensi/sub kompetensi yang dibutuhkan industri. Hasil analisis ini akan melahirkan sejumlah pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja. Hasil analisis inilah yang menjadi acuan dalam menyusun bahan ajar (modul) yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode dalam penyusunan bahan ajar ini sangat bergantung pada strategi dan metoda pembelajaran yang akan digunakan, apakah akan dilakukan secara klasikal atau kelompok, teori atau praktek. Untuk itu bahan ajar akan lebih efektif bila dibuat berbentuk handout atau lembar informasi, lembar kerja, yang topik-topiknya relevan dengan unit kompetensi/sub kompetensi yang akan dibahas. Jadi, pola bahan ajar sangat tergantung pada pendekatan apa yang dilaksanakan, individual, klasikal atau kelompok. Sebaiknya

dalam penyusunan bahan ajar di SMK Model ini memperhatikan beberapa hal seperti berhubungan dengan topik-topik yang aktual dan relevan dengan kompetensi yang sedang dipelajari, mencantumkan tujuan yang jelas, mengandung pengetahuan/informasi yang aplikatif, mudah dipelajari, menarik, tidak mematikan rasa ingin tahu dan fleksibel untuk dipelajari secara individu atau kelompok, mengandung informasi yang lengkap dan realistis dalam setiap kontak pembahasannya dan supaya menarik sebaiknya mencantumkan gambar-gambar, ilustrasi yang relevan dan membangkitkan motivasi peserta diklat untuk belajar lebih banyak. Dengan melihat hal-hal seperti itu maka di masa yang akan datang para guru di SMK harus mampu menyusun bahan ajar sendiri untuk kepentingan diklat berbasis kompetensi ini.

4) Penyediaan Media Pembelajaran

Dari temuan yang ada dapat diketahui bahwa ternyata media pembelajaran sangat kurang pada ke empat SMK Model ini. Kekurangan media pembelajaran ini baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dari sisi perangkat keras seperti *Overhead Projector*, *Slide Projector*, model peralatan/mesin atau *prototype*, umumnya belum ada dan yang ada hanyalah OHP dan jumlahnya umumnya hanya satu atau dua buah yang digunakan di ruang rapat, jadi bukan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari sisi perangkat lunak, seperti *transparancy* atau *slide* dan lainnya pada ke empat SMK tersebut tidak ada. Dengan demikian maka sulit sekali bagi guru untuk termotivasi mengembangkan media pembelajaran karena perangkat keras yang ada sangatlah minim. Untuk mengatasi hal ini maka sebenarnya guru dapat membuat gambar-gambar/poster mengenai peralatan atau model sebuah peralatan dengan bantuan siswa. Jadi siswa dapat diajak untuk memenuhi kebutuhan dalam hal penyediaan alat peraga untuk memudahkan guru menjelaskan serta dipahami siswa dengan lebih baik.

Dari sisi motivasi guru menurut kepala sekolah sudah didorong untuk menggunakan OHP, namun guru tidak mau. Keterangan ini bisa saja benar tetapi karena dari segi jumlah OHP ini terbatas maka tentu saja guru menjadi tidak termotivasi untuk menggunakan OHP yang ada. Selain itu guru merasa sudah tidak ada waktu untuk membuat karena sudah banyak jam mengajarnya, namun sebenarnya walaupun sulit, lembar *transparancy* perlu dibuat dan perlu diadakan/dirancang media (alat peraga) yang relevan dengan topik-topik kompetensi yang diajarkan baik teori ataupun praktek. Lebih baik lagi bila dapat dibuat alat peraga untuk membantu proses pembelajaran yang lebih efektif. Sebaiknya pimpinan sekolah menyediakan perangkat keras seperti OHP dalam jumlah yang banyak, sehingga para guru termotivasi untuk membuat materi-materi belajar dalam bentuk lembar tranparasi bagi tiap-tiap unit kompetensinya. Hal ini akan lebih memudahkan para guru dalam mengajar, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Bila perlu proses pembuatan lembar transparasi dapat dilakukan dalam satu waktu khusus berupa lokakarya dengan mengundang nara sumber dari lembaga lain seperti PPPG Teknologi atau perguruan tinggi untuk memotivasi guru. Lebih baik lagi bila juga dibuat media pembelajaran dalam bentuk alat peraga seperti pesawat latih (*training object*) yang juga dipandang perlu oleh pihak sekolah, karena dengan bantuan alat peraga diyakini akan lebih memudahkan kepada para guru dalam memberikan materi dan siswa juga akan lebih mudah dalam memahai materi-materi diklat yang diajarkan. Jadi dalam penyediaan media pembelajaran ini dibutuhkan kreativitas guru untuk mengembangkannya dengan dorongan dari pihak pimpinan sekolah yang memberikan kemudahan dan insentif untuk mewujudkannya. Sebenarnya dengan adanya kesadaran dari pihak pimpinan maupun guru bahwa peran media pembelajaran seperti peralatan *audiovisual*, sangat membantu bagi siswa dalam mempelajari suatu pengetahuan maupun keterampilan tertentu, dapat

dikembangkan untuk mendorong penyediaannya. Pada SMK yang memiliki kemampuan biaya dan kesadaran ini memang telah diupayakan. Karena benar-benar disadari bahwa media akan memperjelas suatu materi lebih-lebih bila digunakan dalam rangka belajar individual. Di masa depan akan menjadi keharusan bahwa dalam menjelaskan suatu materi maka media menjadi alat bantu yang sangat diperlukan dan harus disediakan. Mengenai penggunaannya dapat diatur supaya sesuai dengan tujuan maupun jenis materi yang diajarkan. Media yang akan disediakan oleh pihak sekolah sebaiknya memenuhi kriteria seperti mudah untuk digunakan dan menarik supaya dapat memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri.

5) Penyediaan guru

Pada keempat SMK Model tersebut terdapat kondisi yang berbeda satu sama lain yang dapat dirangkum sebagai berikut :

- a) Pada SMKN 4 Jakarta jumlah guru relatif sedikit tetapi telah mencukupi karena jumlah kelas yang sedikit pula, pada umumnya para guru ini belum banyak mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.
- b) Pada SMKN 2 Serang jumlah guru sangat mencukupi dan dari segi penguasaan kompetensi sudah mencukupi.
- c) Pada SMK Texmaco umumnya semua guru adalah guru honorer dan juga tidak ada guru tetap yayasan. Guru yang ada selama ini mengandalkan guru honorer dari SMK negeri maupun dari staf PT. Texmaco. Dari guru negeri ternyata belum banyak yang pernah mengikuti pelatihan kompetensi, sedangkan dari staf PT. Texmaco memiliki tingkat penguasaan kompetensi yang mencukupi.
- d) Pada SMK YPPT Garut banyak guru berstatus guru negeri yang diperbantukan, jadi sangat membantu pihak sekolah dalam hal penggajian bagi guru-guru tersebut. Namun

umumnya kurang banyak mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi, sehingga sebenarnya kurang kompeten dalam mengajar.

Kesamaan kondisi guru pada ke empat SMK tersebut adalah belum satupun memiliki sertifikat kompetensi dari industri tertentu sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, misalnya MPKN atau ATMI. Pada SMK swasta, masih kekurangan guru sehingga banyak mengambil guru honorer dari SMK Negeri. Dengan kondisi guru yang demikian maka memang dapat dikatakan belum sesuai dengan tuntutan diklat berbasis kompetensi yang mensyaratkan adanya sertifikasi kompetensi yang dikuasai oleh seorang guru. Hal tersebut menjadi sebuah masalah tersendiri bagi para guru, karena masalah sertifikat kompetensi ini oleh para guru dianggap tidak terlalu perlu. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa para guru ini yang telah lulus dari program pendidikan guru (IKIP) merasa telah memiliki kewenangan untuk mengajar pada jenjang pendidikan menengah, dan hal tersebut disahkan dengan dimilikinya ijazah Akta Iff atau Akta IV oleh para guru tersebut.

Dari temuan yang ada juga dapat dilihat bahwa ternyata para guru masih belum memahami prinsip belajar berbasis kompetensi secara utuh serta sistem penilaian kompetensi berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja, untuk itu para guru perlu mendapatkan program pelatihan khusus mengenai cara pembelajaran maupun cara penilaian dalam diklat berbasis kompetensi. Kemudian untuk guru praktek dasar hendaknya perlu dilakukan kegiatan retraining praktek kerja bangku bagi guru-guru tersebut, karena terlihat kurang disiplin dalam mengawasi praktek kerja bangku para siswanya. Selain itu para guru perlu mempelajari ulang cara belajar (*learning how to learn*) serta potensi individu siswa supaya para guru kejuruan dapat merekomendasikan pendekatan belajar yang tepat dan efektif.

Para guru hendaknya juga memperhatikan kepentingan serta kesulitan siswa dalam diklat supaya guru dapat dengan tepat dapat memberikan metoda pembelajaran yang tepat

bagi seorang siswa, karena pada dasarnya diklat berbasis kompetensi akan tepat dilakukan apabila siswa diberikan perhatian per individu dengan melihat kelebihan maupun kekurangan siswa tersebut.

Dari sisi penyediaan guru yang merasa sulit adalah dari SMK swasta, dan sebenarnya SMK swasta seperti SMK YPPT Garut maupun SMK Texmaco Karawang harus sudah dapat mandiri dengan mengangkat guru tetap yayasan. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan karena kedua SMK tersebut dari segi finansial sudah cukup kuat. SMK YPPT Garut yang sudah berusia kurang lebih 25 tahun tentunya telah memiliki tabungan atau dana pengembangan yang mencukupi yang terlihat dari kualitas bangunan maupun peralatan yang ada. Sedangkan SMK Texmaco dari segi keuangan didukung langsung oleh pihak yayasan PT. Texmaco untuk membayar honor guru, untuk itu pada masa yang akan datang dapat ditingkatkan dengan mengangkat guru tetap yayasan, apalagi sebenarnya hal itu sudah menjadi persyaratan dalam pendirian sekolah swasta.

Sebenarnya sekolah-sekolah tersebut termasuk sekolah swasta, harus benar-benar paham bahwa untuk melaksanakan diklat berbasis kompetensi maka diperlukan guru yang kompeten dalam arti menguasai atau ahli dibidangnya. Selain penguasaan ini maka guru harus dibekali dengan pemahaman tentang substansi dari konsep diklat berbasis kompetensi. Semua pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan diklat berbasis kompetensi seperti sekolah/lembaga diklat, industri dan lembaga pendukung lainnya harus memiliki komitmen dalam hal kompetensi guru ini. Pihak sekolah sebaiknya secara terus menerus melakukan usaha-usaha peningkatan kompetensi bagi guru dalam rangka mempersiapkan tenaga profesional untuk penyelenggaraan diklat. Dalam hal ini industri sebagai institusi pasangan sekolah memang memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan magang atau praktek kerja,



karena selain memiliki fasilitas peralatan yang cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan juga industri mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan profesional untuk melatih dan membimbing para guru yang belum memiliki kompetensi dalam bidangnya. Ini dapat dilihat di beberapa negara seperti Australia dan Jerman bahwa untuk menjadi guru teknik maka harus memiliki pengalaman industri lebih dulu. Kemungkinan yang sudah hampir pasti bahwa pada saat yang akan datang akan muncul persyaratan bahwa guru yang terlibat dalam proses penyelenggaraan diklat harus memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu. Selain tuntutan kompetensi dan kualifikasi maka seorang guru dituntut mampu menciptakan lingkungan diklat yang kondusif, karena itu juga sebaiknya memiliki kepribadian yang menyenangkan dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal inilah yang belum ada pada SMK yang menjadi tempat penelitian ini, yang mungkin memang mewakili kondisi di banyak tempat lain. Jadi guru harus dapat bekerja secara profesional selain guru tersebut memiliki kewenangan untuk mengajar di bidang kompetensinya.

Masalah lain dalam hal guru ini adalah apakah persyaratan kompetensi dalam bidang kejuruan akan menjadi penghalang dalam kewenangan mengajarnya, karena sebenarnya dengan telah lulus sarjana dari sebuah LPTK maka guru telah memiliki kewenangan mengajar di bidangnya. Hal ini memang menjadi perdebatan di lingkungan sekolah terutama di antara para guru sendiri. Banyak guru merasa khawatir bahwa dengan adanya persyaratan penguasaan kompetensi ini akan menggugurkan kewenangannya dalam mengajar. Tetapi sebenarnya bagi guru yang menyadari tugas dan tanggung jawab guru maka hal ini bukan merupakan suatu ancaman tetapi suatu tantangan yang dapat diatasi dengan selalu memelihara kompetensi yang selama ini telah dimiliki dan diperlukan penyegaran melalui penataran peningkatan kompetensi sesuai bidangnya.

6) Siswa/peserta diklat

Pada keempat SMK Model ini yang benar-benar melakukan seleksi adalah SMKN 4 Jakarta dan SMKN 2 Serang. Sedangkan pada SMK Texmaco Karawang walaupun ada seleksi tetapi ada pengistimewaan bagi keluarga karyawan PT. Texmaco yang harus diterima. Pada SMKN 4 Jakarta seleksi dilakukan karena hanya menerima satu kelas (+/-36 siswa) untuk tiap program keahlian, sedangkan untuk SMKN 2 Serang hanya menerima 3 kelas per program keahlian demikian juga SMK Texmaco. Dari sisi tingkat kemampuan siswa yang tercermin dari Daftar Nilai Ujian Nasional maka yang dapat dikatakan bagus adalah untuk SMKN4 Jakarta dan SMKN 2 Serang, sedangkan untuk SMK Texmaco ternyata walaupun hanya menerima 3 kelas tetapi dari sisi kemampuan masih diragukan karena ternyata apabila yang mendaftar adalah anak dari keluarga staf dan karyawan PT. Texmaco maka ada keharusan tidak tertulis untuk diterima walaupun dari segi kemampuan rendah. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan tetapi hal ini terjadi karena staf dan karyawan PT. Texmaco merasa bahwa SMK Texmaco adalah milik perusahaan jadi harus mau menerima anak atau keluarga staf dan karyawan PT. Texmaco.

Khusus untuk SMK YPPT Garut memang tidak ada seleksi, karena sebagai sekolah swasta maka merasa sayang bila harus menolak calon siswa, maka semua calon siswa diterima sehingga tidak ada seleksi. Hal tersebut sebenarnya akan merugikan sekolah sendiri apabila tidak ada penanganan khusus bagi siswa yang memiliki kemampuan kurang. Untuk itu dengan adanya pelaksanaan model diklat berbasis kompetensi di SMK YPPT Garut maka ini suatu kesempatan untuk menerapkan sistem pembelajaran individual sehingga seorang siswa yang lambat akan tetap dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kecepatannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena ternyata angka *dropout* cukup tinggi (sekitar 20%), dan *dropout* ini salah satu penyebabnya adalah karena siswa merasa

ketinggalan pelajaran sehingga menjadi malas untuk mengejarnya. Yang ditemukan secara umum terjadi pada keempat SMK Model ini adalah tidak dilakukannya tes minat-bakat (psikotes) sehingga sulit dipantau hasil yang obyektif dari kemajuan belajar siswa, apakah seorang siswa memang ditempatkan sesuai minat dan bakatnya atau karena kemauan orang tua atau sekolah sendiri.

Dengan melihat kenyataan-kenyataan seperti di atas maka sebenarnya kualifikasi peserta diklat, minat dan bakat serta sistem seleksi yang baik dan proposional perlu ditetapkan sebelum diklat dilaksanakan. Dalam hal jumlah peserta diklat sebaiknya harus diingat jumlah ruang belajar (kelas) dan fasilitas yang tersedia. Dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang pada sekolah negeri dan sekitar 45 orang pada SMK swasta, maka jumlah ini hanya sesuai untuk proses belajar teori secara klasikal, tetapi untuk kegiatan praktek, jumlah siswa praktek dapat diatur sesuai dengan metoda pembelajaran yang digunakan. Sehingga dengan mengingat hal-hal seperti di atas maka perlu diperhatikan bahwa jumlah siswa seharusnya sesuai dengan jumlah guru, jumlah ruangan, luas ruangan, jumlah peralatan maupun luas bangunan secara keseluruhan. Selain itu kualifikasi siswa harus dijamin pada saat siswa masuk dan supaya sesuai dengan minat dan bakat maka sebaiknya dilakukan tes untuk penempatan yang tepat pada bidang yang sesuai dengan bakat dan minat siswa.

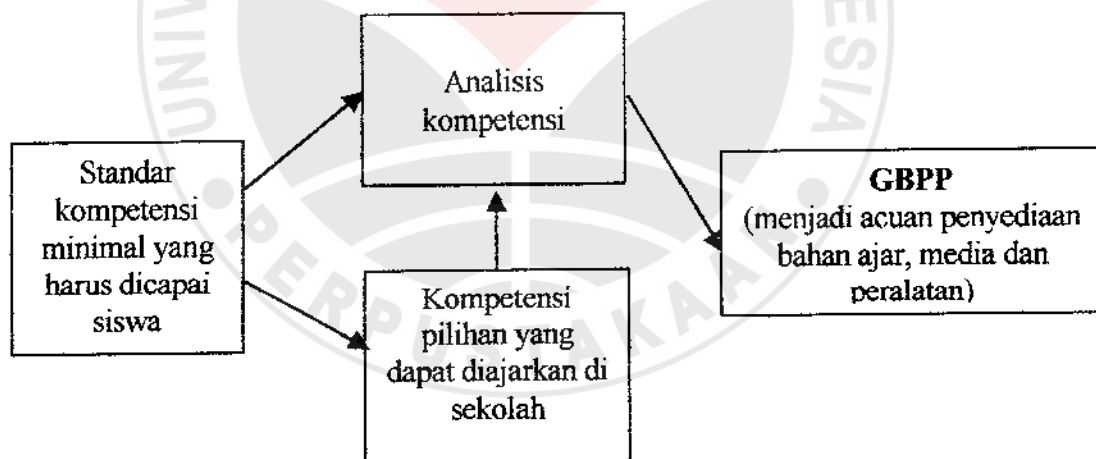
b. Pola penyiapan faktor pendukung diklat kejuruan

1) Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum pada SMK Model ini dapat dimulai dari sinkronisasi antara kurikulum SMK Edisi Tahun 1999 dengan Standar Kompetensi MPKN-Kadin. Sebaiknya proses sinkronisasi kurikulum ini dilakukan dengan melibatkan pihak industri,

supaya ada kesesuaian antara pihak industri dengan pihak sekolah dalam memberikan materi kepada siswa. Jadi hasil pengembangan kurikulum adalah berupa kurikulum yang telah ditambah dengan hasil sinkronisasi, atau kemungkinan ada pengurangan materi karena sebenarnya ada materi yang tidak dibutuhkan oleh industri. Selanjutnya hasil sinkronisasi ini digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan program kerja (*action plan*) sekolah.

Pada masa mendatang pihak Depdiknas/pusat tidak perlu menuliskan materi yang harus diajarkan di sekolah tetapi cukup menunjuk unit kompetensi yang harus dijadikan acuan di sekolah. Pihak pusat hanya menetapkan unit-unit kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa, sedangkan penyusunan kurikulum diklat dilakukan melalui analisis kompetensi oleh para guru di sekolah, sehingga ada keleluasaan bagi pihak sekolah dalam memberikan materi diklat, yang penting acuannya adalah unit kompetensi yang telah ditetapkan oleh pihak pusat.



Gbr. 8 : Pola pengembangan kurikulum di sekolah

Sedangkan masalah pemahaman guru yang belum jelas terhadap implementasi kurikulum berbasis kompetensi, karena saat ini sebenarnya telah ada buku pedoman

pelaksanaan kurikulum (tetapi umumnya hanya tersimpan di ruang kepala sekolah atau wakasek kurikulum) maka sebaiknya buku pedoman ini diberikan kepada guru dan isinya disosialisasikan kepada semua guru, sehingga semua guru mengetahui secara jelas bagaimana kurikulum berbasis kompetensi diimplementasikan.

2) Penyediaan Peralatan

Dengan kondisi peralatan yang ada di sekolah seperti sekarang ini maka kompetensi yang dapat dipelajari siswa pada program keahlian Mesin Perkakas hanya dapat difokuskan pada penguasaan kompetensi membaca gambar, pengukuran, kerja bangku, mengelas dasar, pemesinan umum, mesin bubut, mesin frais, dan mesin skrap. Jadi jenis peralatan standar yang harus dimiliki sekolah adalah :

- Meja gambar
- Mesin gambar
- Perangkat peralatan pengukuran
- Perangkat peralatan tangan
- Mesin bor
- Mesin gerinda asah
- Mesin skrap
- Mesin bubut
- Mesin frais dengan dividing head

Dengan demikian peralatan standar minimal seperti di atas itulah yang harus disediakan oleh sekolah, karena dengan peralatan seperti itu maka lulusan SMK program studi Mesin Perkakas akan dapat menjadi *operator* mesin bubut, *operator* mesin frais dan *operator* mesin skrap.

Sistem pembelajaran harus disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada dengan cara merubah metoda dan jadwal pembelajaran, seperti menambah jam buka bengkel, dengan waktu praktek dilakukan sampai sore hari dengan pembagian kelompok praktek menjadi dua atau tiga kelompok sesuai dengan waktu yang akan digunakan untuk praktek. Untuk menunjang hal ini sekolah harus menyediakan dana untuk membayar kelebihan jam mengajar guru (untuk SMK negeri) atau membayar honor mengajar tambahan tersebut (untuk SMK swasta).

Pemanfaatan bahan praktek harus sehemat mungkin dan sebaiknya dicarikan sumber lain (selain dari sekolah/siswa) yang memungkinkan seperti melalui penjualan hasil praktek atau jasa lain yang dapat diberikan oleh sekolah. Cara penghematan bahan praktek pada program keahlian Mesin Perkakas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :

- Pada saat praktek ukuran benda kerja dibuat besar sehingga bila terjadi kegagalan dalam ukuran maka ukuran tersebut dapat diperkecil dengan ketelitian yang sama.
- Pada satu pekerjaan/benda kerja maka dapat digabungkan beberapa keterampilan dalam satu unit kompetensi sehingga dapat menghemat bahan praktek.
- Benda kerja yang dibuat oleh siswa harus benda kerja yang dapat dijual atau merupakan pekerjaan pesanan dari luar sekolah/industri, sehingga sekolah tidak menanggung biaya bahan praktek.

3) Penyediaan Bahan Ajar

Bahan ajar berupa buku yang ada di perpustakaan tetap digunakan sebagai buku pegangan, sampai dipenuhinya kebutuhan modul pembelajaran individual. Untuk memperdalam pengetahuan siswa perlu disediakan buku referensi berdasarkan masing-masing program keahlian. Bahan ajar berupa modul individu yang sudah disediakan oleh Direktorat Dikmenjur, harus segera diperbanyak dan digunakan oleh siswa baik dengan

cara membeli atau dipinjamkan. Guru harus didorong untuk menulis bahan ajar untuk program diklat yang diajarkannya, untuk memotivasinya sebaiknya diberikan insentif bagi para penulis bahan ajar tersebut. Untuk penulisan ini sebaiknya dilakukan dalam waktu *workshop* atau lokakarya, penulisan bahan ajar ini tidak perlu seperti buku pelajaran, tetapi yang penting ada materi inti pada tiap kompetensi dan diberikan daftar buku referensi sehingga dapat dijadikan pedoman belajar bagi siswa. Sesuai dengan kompetensi minimal yang harus dicapai siswa maka modul yang ditulis sebaiknya diprioritaskan pada bidang :

- Teknik gambar mesin
- Teknik pengukuran
- Teknik kerja bangku/penggunaan peralatan tangan
- Teknik mengebor
- Teknik mengasah
- Teknik penyekrapan
- Teknik membubut
- Teknik mengefrais

4) Penyediaan Media Pembelajaran

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran ini, di antaranya adalah :

- Guru dibantu siswa membuat gambar-gambar/poster mengenai peralatan atau model sebuah peralatan.
- Siswa ditugaskan untuk membuat gambar/poster atau alat peraga lain untuk memudahkan siswa belajar dengan lebih baik.

- Lembar *transparency* perlu dibuat sesuai dengan topik-topik kompetensi yang diajarkan baik teori ataupun praktek. Bila perlu proses pembuatan lembar *transparency* dapat dilakukan dalam satu waktu khusus berupa lokakarya.
- Lebih baik lagi bila juga dibuat media pembelajaran dalam bentuk alat peraga berupa pesawat latih (*training object*) yang juga dipandang perlu oleh pihak sekolah.
- Disediakan perangkat lunak komputer yang berupa program pembelajaran teori maupun praktek (sudah tersedia di pasaran), untuk itu pada SMK yang memiliki kemampuan dapat menyediakannya seperti yang telah dirintis selama ini.
- Untuk terselenggaranya hal ini pimpinan sekolah sebaiknya menyediakan insentif bagi guru baik berupa upah/honor atau insentif lain.

5) Penyediaan guru

Untuk menyediakan guru yang kompeten pada bidangnya maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- Guru mendapatkan program pelatihan khusus mengenai cara pembelajaran maupun cara penilaian dalam diklat berbasis kompetensi.
- Guru praktek dasar hendaknya perlu dilakukan kegiatan *retraining* praktek kerja bangku, karena terlihat kurang disiplin dalam mengawasi praktek kerja bangku para siswanya.
- Para guru perlu mempelajari cara belajar (*learning how to learn*) serta potensi individu siswa supaya para guru kejuruan dapat merekomendasikan pendekatan belajar yang tepat dan efektif.
- Para guru harus lebih memperhatikan kepentingan serta kesulitan siswa dalam diklat supaya guru dapat dengan tepat dapat memberikan metoda pembelajaran yang tepat bagi seorang siswa.

- SMK swasta harus sudah dapat mandiri dengan mengangkat guru tetap yayasan, karena kedua SMK swasta yang menjadi model ini dari segi finansial sudah cukup kuat.

6) Siswa/peserta diklat

Dalam hal penerimaan siswa baru sekolah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Bila calon siswa ternyata lebih besar daripada kapasitas penerimaan maka harus dilakukan seleksi berdasarkan DANUAN/NEM, tes atau sesuai ketentuan dari kantor Dinas daerah/wilayah setempat. Untuk seleksi ini nilai Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan keterampilan dapat dijadikan pertimbangan utama dalam penerimaan.
- Persyaratan tentang kondisi fisik tidak boleh merugikan calon siswa dan dijauhkan dari adanya diskriminasi. Hal-hal yang sering menjadi kendala adalah kondisi fisik ataupun cacat fisik, padahal kondisi fisik atau cacat fisik tertentu belum tentu menghalangi seorang siswa untuk belajar di SMK yang penekanaannya pada keterampilan, misalnya untuk tinggi badan dipersyaratkan minimal 155 cm. Syarat ini sering diterapkan secara merata untuk semua bidang keahlian, padahal untuk bidang elektronika hal itu bukan merupakan suatu hambatan, demikian juga untuk penyandang cacat fisik sebaiknya diarahkan pada bidang yang dapat dipelajarinya tanpa membahayakan dirinya ataupun orang lain, jadi jangan menolak tanpa adanya pertimbangan yang adil.
- Untuk lebih baiknya demi masa depan siswa sendiri maka penentuan jurusan/program keahlian yang diambil ditentukan dari hasil tes minat dan bakat bagi siswa, sehingga seorang siswa tidak akan kecewa dalam memilih suatu jurusan/program tertentu.
- Proses penerimaan siswa baru harus berlangsung obyektif, karena bila ada kecurangan maka hal ini akan merusak sistem pendidikan dan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa yang dididik di sekolah tersebut.

C. Pelaksanaan Diklat Kejuruan

1. Pengelolaan Proses Pembelajaran

a. Pembahasan

Penyajian diklat atau kegiatan belajar mengajar pada keempat SMK yang menjadi model diklat berbasis kompetensi ini ternyata masih biasa yaitu dilakukan secara klasikal. Perbedaannya bila dibandingkan dengan sebelum menjadi model adalah adanya pembelajaran *remedial* apabila pada saat tes dilakukan ternyata hasilnya belum memenuhi syarat untuk dikatakan kompeten atau menguasai kompetensi/sub kompetensi yang dipelajari. Sebenarnya proses remediasi ini keberhasilannya sangat tergantung dari komitmen guru. Karena proses remediasi ini dilakukan oleh guru maka apabila guru bersikap tidak jujur atau merasa kasihan pada seorang siswa sehingga memberi nilai yang memenuhi syarat untuk disebut kompeten maka proses remediasi yang merupakan salah satu ciri mastery learning akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu pemantauan oleh pimpinan sekolah (minimal ketua program keahlian) harus dilakukan untuk menjamin berjalannya prinsip belajar tuntas. Dari temuan yang ada di empat sekolah model ini ternyata latihan sebelum tes belum dilakukan secara intensif, padahal telah tersedia pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini terjadi kemungkinan karena para guru yang terlibat dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi ini masih belum konsisten untuk melakukan latihan atau kemungkinan lain kurangnya bahan untuk berlatih sebanyak mungkin untuk mencapai kompetensi.

Selanjutnya perlu disediakan pedoman pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan belajar tuntas ini agar dapat dipahami dengan mudah oleh para guru dan kemudian ada supervisi dari pimpinan. Pembelajaran *remedial* yang dilakukan sebaiknya dipantau penyelenggaraannya oleh pimpinan sekolah, untuk mencegah terjadinya

kemalasan guru akibat adanya tambahan beban serta menurunnya motivasi, akibat merasa tidak diperhatikan oleh pimpinan sekolah. Untuk mewujudkan pembelajaran *remedial* bagi siswa ini harus tersedia modul yang lengkap di mana siswa dapat belajar sendiri kemudian bila ada yang belum jelas dapat ditanyakan ke guru, sehingga guru dapat fokus pada saat mengetes atau menguji ulang. Hal tersebut perlu dilakukan seperti itu karena proses pembelajaran tetap dilakukan secara klasikal untuk program diklat teori, sedangkan untuk praktek dilakukan secara individu atau kelompok. Untuk materi praktek pelaksanaan *remedial* dapat dilakukan dengan latihan mengulang keterampilan yang belum dikuasai. Pada program keahlian Mesin Perkakas pengulangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan benda kerja yang ada, dengan merubah ukuran tetapi keterampilan serta ketelitian ukuran tetap dapat dicapai.

Supaya siswa selama belajar dapat termotivasi maka pada saat proses pembelajaran yang harus ditekankan adalah penguasaan guru terhadap metoda mengajar yang bervariasi dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, dan hendaknya untuk pembelajaran teori tidak dilakukan secara kaku harus di ruang kelas. Pada pembelajaran teori siswa harus diberi kebebasan untuk belajar secara mandiri dan mencari sumber belajar di perpustakaan, jadi proses pembelajaran harus fleksibel. Proses pembelajaran yang fleksibel ini perlu dilakukan karena sebenarnya pada diklat berbasis kompetensi proses pembelajaran idealnya dilakukan secara individual. Namun yang perlu diingat walaupun proses pembelajaran dilakukan secara fleksibel tetapi tetap harus dilakukan pengawasan. Pengawasan ini tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban kelas supaya tidak ada suasana gaduh yang tidak terkendali sehingga mengganggu kelas lain.

Untuk pengembangan lebih lanjut ke arah pembelajaran tuntas ini, sebenarnya yang harus dilakukan oleh guru di dalam ruang kelas untuk pembelajaran teori adalah sebagai

pengawas dan fasilitator bagi siswa dalam mempelajari modul yang tersedia. Hal ini sesuai dengan fungsi guru pada diklat berbasis kompetensi yaitu pengajar diharapkan mampu bermain dalam tiga peran utama dalam penyajian pelatihan, yaitu sebagai instruktur, maka pengajar harus ahli dalam bidangnya, sebagai fasilitator, maka pengajar harus mampu memfasilitasi proses pembelajaran dan sebagai pembentuk mekanisme, di sini pengajar berperan sebagai pengatur mekanisme atau manajer proses pembelajaran.

Selain peran guru seperti disebutkan di atas tadi maka juga diperlukan pembekalan bagi peserta diklat tentang cara belajar individual yang efektif disekolah dan luar sekolah. Guru hendaknya selalu berusaha untuk memilih metode belajar individu yang cocok untuk semua masing-masing peserta diklat. Guru harus menerapkan metode pembelajaran yang menempatkan peserta diklat sebagai mitra untuk mensukseskan tugas selama proses pembelajaran. Selanjutnya sekolah perlu menggalakkan kegiatan *project work* yang menuntut pemecahaan masalah secara kelompok dan individu serta kerja sama tim. Dalam pola pembelajaran guru harus mulai berani mengembangkan pola pembelajaran individu, kelompok atau gabungan, jadi tidak hanya klasikal saja. Walaupun pembelajaran dalam diklat berbasis kompetensi dapat dilakukan secara klasikal, *individual*, kelompok atau kombinasi dari ketiga jenis metoda tersebut dan tidak ada keharusan harus menggunakan suatu metoda tertentu, namun karena memiliki prinsip belajar tuntas maka yang paling sesuai adalah pembelajaran individual. Pembelajaran secara klasikal dapat dilakukan dalam hal pembelajaran teori, dengan keharusan adanya *remedial learning* dan *remedial test* bagi peserta pelatihan yang belum berhasil lulus dalam suatu tes/ujian. Sedangkan dalam pembelajaran *individual* salah satu sistem yang dapat digunakan adalah sistem modul karena modul sudah tersedia dari pihak Direktorat Dikmenjur. Dalam diklat berbasis kompetensi pembelajaran *individual* ini adalah yang paling sesuai baik untuk teori maupun praktek.

Dengan dukungan modul yang sesuai untuk belajar secara individu maka seorang peserta diklat yang cepat penguasaannya atas suatu materi maka akan lebih banyak materi atau kompetensi yang akan dikuasai sementara bagi peserta diklat yang lambat tetap dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Metoda belajar secara individu dan kelompok yang selama ini telah digunakan pada pembelajaran praktek harus lebih dikembangkan dengan membagi kelas dalam beberapa kelompok dengan kegiatan yang berbeda pada masing-masing individu atau kelompok. Dalam diklat berbasis kompetensi metoda belajar kelompok ini dapat digunakan apabila kondisi peralatan/obyek praktek kurang mencukupi untuk belajar secara individu atau digunakan dalam situasi kerja proyek, dan hal inilah yang paling memungkinkan dilaksanakan pada program keahlian. Apabila guru mendapatkan kesulitan maka dapat digunakan pola pembelajaran gabungan yaitu dengan mengkombinasikan pola klasikal, individu dan kelompok.

Tempat pembelajaran dapat dilakukan di sekolah atau di perusahaan/industri, di mana bila pembelajaran dilakukan di sekolah maka harus tersedia bahan ajar, media, alat dan bahan yang diperlukan untuk pencapaian kompetensi. Lingkungan belajar harus dibuat nyaman seperti tempat duduk, ventilasi, udara, penerangan, peralatan dan fasilitas untuk bengkel praktek serta yang lainnya. Namun sebenarnya sesuai dengan tuntutan kompetensi, walaupun peralatan memenuhi syarat tetapi untuk kesempurnaan kompetensi, yaitu supaya memahami situasi kerja yang sebenarnya maka peserta diklat/siswa dituntut untuk praktek kerja langsung di industri yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dikuasai. Proses pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha/industri juga dapat meliputi pengetahuan maupun keterampilan, terutama yang tidak dapat dipelajari di sekolah atau merupakan penyempurnaan dari pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari di sekolah. Perusahaan atau industri yang dipilih harus relevan atau sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai.

Untuk itu pihak sekolah hendaknya dapat menggalang kerja sama yang erat dengan perusahaan/industri tempat praktek kerja industri para peserta pelatihan yang bersangkutan supaya dapat diperoleh kesepakatan tentang kompetensi yang dapat dicapai oleh seorang peserta diklat/siswa di perusahaan/industri tersebut. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan praktek kerja industri dituntut adanya pelatih yang memonitor kegiatan peserta diklat/siswa sehingga dapat dideteksi kompetensi apa yang dapat dipelajari dan kompetensi mana yang tidak dapat dipelajari di tempat kerja tersebut. Sebaliknya dengan kesepakatan antar lembaga hendaknya instruktur dari perusahaan/industri dapat didatangkan di lembaga diklat/sekolah untuk memberikan materi teori yang sesuai dengan teknologi yang digunakan di industri.

Dari temuan yang ada diketahui bahwa pada SMKN 2 Serang dan SMK YPPT Garut belum ada pemantauan yang intensif terhadap pelaksanaan praktek kerja industri. Padahal praktek kerja industri ini merupakan perwujudan Pendidikan Sistem Ganda, di mana siswa mempelajari materi yang tidak dapat dipelajari di sekolah. Untuk SMKN 4 Jakarta maupun SMK Texmaco Karawang proses pembelajaran di industri relatif sudah cukup terpantau mengingat SMKN 4 Jakarta sudah memiliki kerjasama erat dengan industri, sedangkan untuk SMK Texmaco praktek kerja industri dilakukan di pabrik PT. Texmaco sendiri sehingga pelaksanaan proses pembelajaran di industri dapat dipantau secara intensif.

Dari keempat SMK tersebut terdapat upaya untuk menyelenggarakan kelas model yang berbeda dengan kelas lain, kecuali SMKN 4 Jakarta yang hanya memiliki satu kelas untuk tiap tingkat pada program keahlian Mesin Perkakas. Kelas model diklat berbasis kompetensi ini sangat baik bila dipandang sebagai kelas percobaan, karena untuk melihat hasil dari penerapan diklat berbasis kompetensi secara konsisten yang kemudian untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang terjadi, sehingga bila terjadi kekurangan bisa

segera diantisipasi. Namun dengan adanya kelas model tersebut memiliki kelemahan juga, yaitu terjadi kecemburuan sosial dari siswa yang bukan kelas model. Karena siswa pada kelas model ini diberikan perlakuan yang berbeda dengan kelas lain, yang bukan kelas model. Pada kelas model yang diterapkan baru pada tingkat satu ini disediakan waktu praktek yang lebih banyak serta bahan ajar berupa modul yang cukup lengkap. Pembelajaran *remedial* juga diterapkan pada kelas ini. Hal-hal yang terkesan “istimewa” ini jelas menimbulkan kecemburuan dari siswa lain, walaupun untuk masuk ke kelas model ini siswa harus melalui seleksi serta biaya yang lebih mahal (pada SMK Texmaco dan SMK YPPT). Selain terjadi kecemburuan di kalangan siswa ternyata di kalangan guru juga terjadi kecemburuan, karena honor mengajar guru pada kelas model lebih tinggi dari guru yang mengajar pada kelas biasa (pada SMK YPPT Garut). Kecemburuan-kecemburuan semacam ini sebaiknya diantisipasi oleh pimpinan sekolah dengan penjelasan yang baik kepada semua unsur sekolah terutama siswa dan guru. Hal ini harus segera dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Mengenai waktu belajar, sekolah harus membiasakan diri untuk menerapkan pola fleksibel walaupun ini diakui cukup sulit diterapkan terutama untuk SMK swasta yang memiliki banyak kelas. Sedangkan mengenai lama belajar di sekolah juga tergantung dari kecepatan belajar tiap individu, sehingga bagi peserta diklat/siswa yang cepat belajar dapat menempuh lama waktu belajar di lembaga diklat/sekolah lebih cepat dari yang lain. Atau dengan lama belajar yang sama maka seorang siswa harus dimungkinkan untuk mempelajari kompetensi lebih banyak dari pada peserta diklat/siswa yang lain. Waktu pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan sistem blok (yaitu selama beberapa bulan di industri) atau *day release* (dalam seminggu 2 atau 3 hari di lembaga diklat/sekolah dan 3 atau 4 hari di industri). Jadi untuk merealisasikan konsep diklat berbasis kompetensi pada



lembaga diklat/sekolah diperlukan adanya kerja sama dengan pihak industri. Potensi industri ini perlu diidentifikasi secara baik untuk mengetahui sejauh mana potensi tersebut memiliki peran dalam bekerjasama dengan pihak sekolah. Dalam upaya menjalin hubungan diklat/sekolah dengan industri sekitarnya perlu dilakukan pemetaan jenis dan jumlah industri sekitar wilayah, baik yang berskala kecil maupun besar. Ini penting dilakukan untuk dapat memastikan bahwa industri/bengkel mana saja yang mungkin dapat diyakinkan akan menjadi industri pasangan. Sekolah-sekolah yang sudah memiliki industri pasangan perlu lebih jauh membina dan mempertahankan kerja sama yang kondusif dan harmonis dengan prinsip saling menguntungkan. Diharapkan semua industri pasangan, disamping memiliki fasilitas yang memadai, juga mengembangkan program kegiatan diklat secara profesional. Pengembangan program pembelajaran yang dilakukan di industri ini, sebaiknya dilakukan bersama pihak sekolah dan industri serta lembaga terkait. Lembaga-lembaga terkait dimaksudkan adalah semua lembaga yang memiliki otoritas dan peran strategis dalam kerjasama antara sekolah dan industri serta mempunyai akses untuk mengembangkan semua potensi yang ada di industri. Lembaga lembaga tersebut antara lain seperti Pemda, Kadin, Asosiasi Profesi dan lembaga diklat yang relevan. Dalam pelaksanaan praktek kerja industri, khususnya pada SMK swasta siswa perlu dibantu dalam mencari tempat prakerin, terutama bagi siswa yang belum mendapat tempat harus dibantu oleh guru. Hal ini perlu dilakukan untuk menjalin hubungan dan adanya kontak langsung antara guru dengan pihak industri. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring selama prakerin dan dibuatkan pedoman pelaksanaan proses pembelajaran dan silabus sinkronisasi standar. Sosialisasi konsep diklat berbasis kompetensi dan sistem pelaksanaan pembelajaran perlu diberikan kepada semua tenaga pengajar/pembimbing di industri, sehingga pihak industri dapat memahami tujuan dari prakerin para siswa ini. Selanjutnya juga perlu dirancang dan dibuatkan instrumen

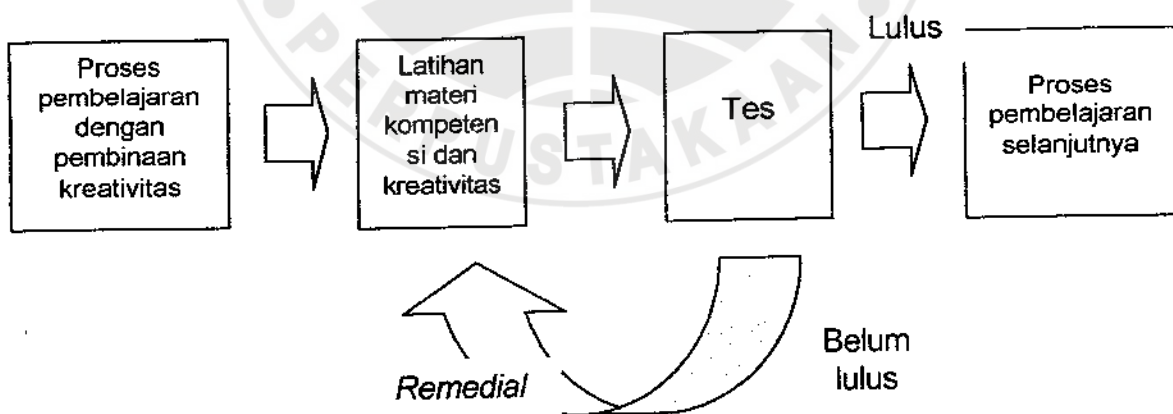
penilaian pencapaian kompetensi siswa berdasarkan kriteria unjuk kerja. Beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan diklat berbasis kompetensi di SMK ini adalah tersedianya fasilitas, media pembelajaran dan komitmen para guru yang terlibat di dalamnya.

b. Pola pengelolaan proses pembelajaran yang dapat dilakukan

Dalam hal pengelolaan proses pembelajaran di sekolah maka harus menggunakan pendekatan pembelajaran tuntas dengan pola pembelajaran sebagai berikut :

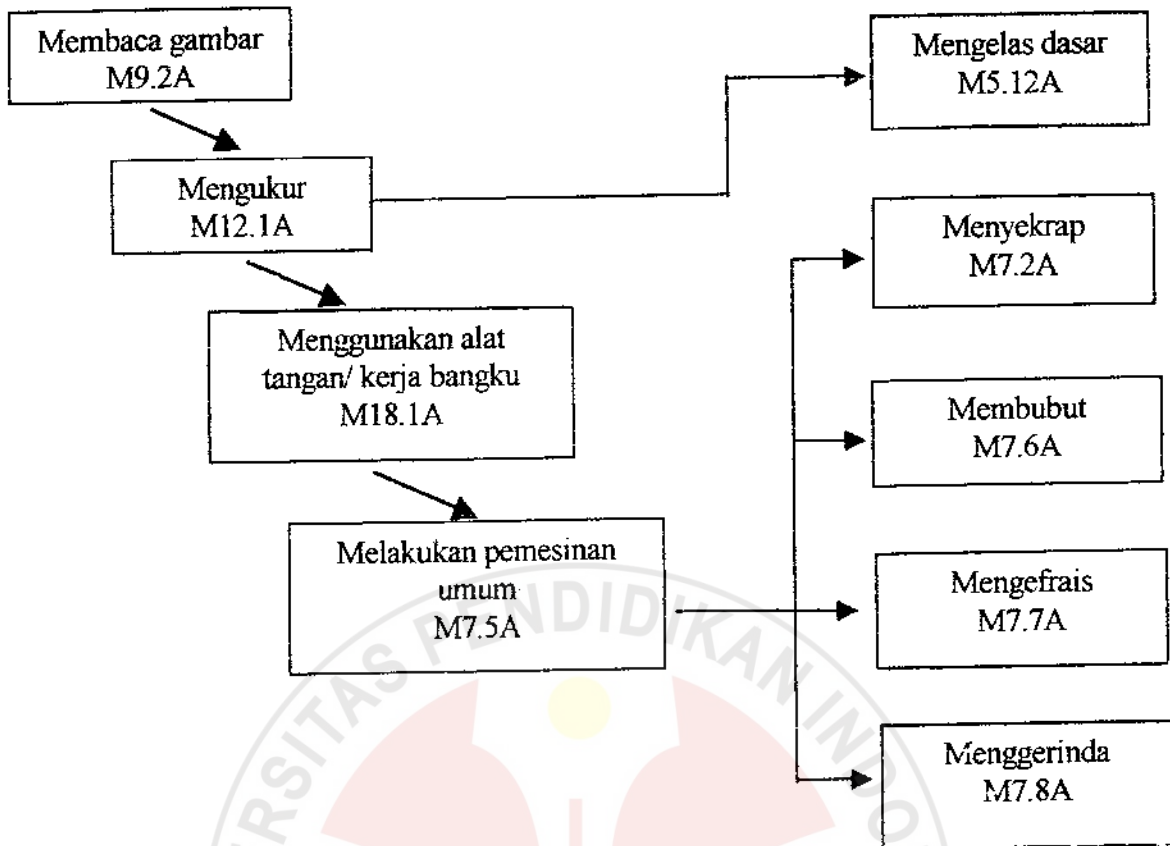
- 1) Pembelajaran teori + latihan --> penilaian teori --> pembelajaran praktek + latihan --> penilaian praktek
- 2) Pembelajaran teori & pembelajaran praktek + latihan --> penilaian teori & praktek.
- 3) Pembelajaran teori & pembelajaran praktek 1 + latihan 1 --> Pembelajaran teori & pembelajaran praktek 2 + latihan 2 --> penilaian teori & praktek 1 & 2.

Supaya lebih jelas pola pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan belajar tuntas dapat digambarkan sebagai berikut di mana harus ada pembinaan kreativitas selama proses pembelajaran :



Gbr. 9 : Proses Pembelajaran di kelas/bengkel

Urutan pembelajaran yang diberikan kepada siswa sebaiknya sesuai dengan urutan yang ada pada standar kompetensi, karena suatu unit kompetensi sering menjadi prasyarat bagi unit kompetensi yang lain. Sesuai dengan alur kompetensi yang tertera pada Standar Kompetensi MPKN-Kadin maka sebenarnya perlu dilakukan penataan urutan materi diklat seperti di bawah ini. Dengan urutan yang demikian maka pada saat seorang siswa mempelajari satu unit kompetensi maka siswa tersebut sudah memiliki bekal yang mencukupi untuk memahami materi pada unit kompetensi yang baru. Dari urutan ini juga dapat dilihat bahwa sebenarnya materi yang perlu diberikan secara berurutan adalah gambar, pengukuran, kerja bangku dan pemesinan umum. Gambar dan pengukuran sebenarnya juga dapat diberikan secara paralel, sebelum menuju pada kerja bangku dan pemesinan umum. Untuk materi kompetensi mesin skrap, mesin bubut, mesin frais dan mesin gerinda dapat dilakukan secara paralel, yang mana hal ini juga akan memudahkan dalam pengaturan bengkel.



Gbr. 10 : Urutan kompetensi yang dipelajari siswa program keahlian Mesin Perkakas berdasarkan Standar Kompetensi MPKN-Kadin

Selanjutnya kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pendekatan diklat berbasis kompetensi, sebaiknya dilakukan pengembangan dengan tindakan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Disediakan pedoman pelaksanaan proses pembelajaran dan silabus hasil sinkronisasi dengan standar kompetensi.
- 2) Proses pembelajaran teori kejuruan dilaksanakan secara bertahap atau blok dengan pendekatan belajar tuntas.

- 3) Kegiatan praktek kerja bangku atau keterampilan dasar untuk Mesin Perkakas sebaiknya dilaksanakan di sekolah untuk memberi bekal kedisiplinan, ketekunan dan ketelitian dalam bekerja.
- 4) Semua program diklat dan instrumen penilaian keberhasilan siswa harus mengacu pada standar kompetensi beserta kriteria unjuk kerja yang tertera pada standar tersebut.
- 5) Untuk mengatasi kekurangan peralatan maka dapat dilakukan pembagian kelompok praktek, yaitu satu kelas dibagi dua. Untuk SMK negeri umumnya jumlah siswa 36 orang maka dengan dibagi dua tiap kelompok ada 18 orang. Sedangkan SMK swasta umumnya jumlah siswa 44 orang, sehingga dengan dibagi dua ada 22 orang per kelompok. Jadi untuk praktek kerja bangku di SMK negeri hanya butuh 18 ragam, dan di SMK swasta butuh 22 ragam. Pada praktek pemesinan, dengan adanya pembagian kelompok ini maka tidak akan ada lagi satu mesin digunakan oleh dua orang apabila jumlah minimal peralatan dipenuhi. Jumlah peralatan minimal ini dapat diperoleh dengan cara penyelenggaraan praktek paralel menggunakan daftar pembagian tugas praktek (DPTP) yang sistematis untuk mengatur waktu praktek dan jenis mesin yang digunakan oleh siswa.

Pembuatan DPTP dapat dibuat berdasarkan jumlah mesin yang dimiliki atau berdasarkan jatah waktu praktek tiap siswa pada tiap mesin. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel DPTP di bawah ini apabila yang dimiliki hanya mesin bor, mesin skrap, mesin bubut dan mesin frais.

Tabel 18 : Daftar pembagian tugas praktek siswa
 untuk jumlah siswa 20 orang (setengah kelas)

No. siswa	Minggu ke :																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B
2	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B
3	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B
4	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B
5	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B
6	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B
7	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B
8	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F
9	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F	F
10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F	F
11	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F	F
12	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S	F
13	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S	S
14	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S	S
15	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L	S
16	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L	L
17	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L
18	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
19	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B
20	L	L	S	S	S	F	F	F	F	F	B	B	B	B	B	B	B	B

Keterangan : L = Mesin pelubang/bor
 S = Mesin skrap
 B = Mesin bubut
 F = Mesin frais

Tabel 19 : Jumlah mesin yang dibutuhkan pada program keahlian Mesin Perkakas untuk jumlah siswa 20 orang (setengah kelas)

No	Jenis mesin	Jumlah
1	Mesin bor	2
2	Mesin bubut	10
3	Mesin frais	5
4	Mesin skrap	3

Sedangkan dalam proses pembelajaran di industri atau yang biasa dikenal dengan praktek kerja industri dengan pendekatan diklat berbasis kompetensi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Disediakan pedoman pelaksanaan praktek kerja industri.
- 2) Disediakan tenaga pembimbing siswa (di industri) yang telah memahami diklat berbasis kompetensi.
- 3) Disediakan instrumen penilaian pencapaian kompetensi siswa berdasarkan kriteria unjuk kerja.
- 4) Disediakan jadwal pelaksanaan dan daftar pembimbing yang bertugas dan bertanggung jawab.
- 5) Disediakan jurnal kegiatan yang digunakan untuk memantau kegiatan siswa dan mengetahui sejauh mana materi yang telah dikuasai siswa.

D. Pembinaan Kreativitas dan Kewirausahaan

1. Pembahasan

Pengembangan diklat berbasis kompetensi ke arah pembinaan kreativitas perlu diupayakan terus agar siswa setelah terjun ke masyarakat ataupun selama belajar di sekolah dapat terus mengembangkan dirinya dengan belajar secara mandiri. Guru harus diberi kesempatan dan didorong untuk mengajak siswa berpikir kreatif untuk memecahkan masalah yang ditemui di lapangan. Hal ini perlu sekali karena menurut prinsip diklat berbasis kompetensi sendiri, ruang lingkup kompetensi juga termasuk kemampuan antisipasi dan adaptasi terhadap kondisi yang baru. Hal ini akan dapat tercapai bila siswa memiliki kemampuan untuk dapat dengan cepat belajar tentang kondisi baru di lapangan, yang sebelumnya belum pernah ditemui. Kenyataan yang ada di lapangan, ternyata guru kebanyakan hanya sekedar menyampaikan materi, sungguh sangat disayangkan karena sebenarnya fungsi guru bukan hanya sebagai penransfer ilmu, tetapi juga sebagai motivator yang mampu mendorong siswa untuk dapat belajar secara mandiri maupun mengembangkan kreativitasnya. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong ke arah pengembangan kreativitas ini dengan latihan-latihan yang dimulai dari tahapan-tahapan sederhana ke arah yang lebih bervariasi. Jadi dalam proses pembelajaran guru sebaiknya dapat menumbuhkan dan memupuk motivasi internal peserta didik untuk belajar lebih jauh dan lebih dalam.

Penugasan-penugasan dari guru seperti di atas merupakan latihan-latihan untuk memupuk kreativitas, karena seringkali karya atau hasil pemikiran para ilmuwan dan penemu kadang juga tidak merupakan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi merupakan kombinasi dari gagasan-gagasan atau unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Jadi kreativitas siswa terbentuk dari keberhasilan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari

hal-hal yang sudah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Selain itu juga kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap suatu obyek atau situasi juga mencerminkan kreativitas jika dalam penilaiannya seseorang mampu melihat obyek, situasi atau masalahnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi banyak kegiatan yang dapat dirancang oleh guru yang semuanya bersifat meningkatkan kreativitas seorang siswa. Dengan tugas yang bersifat mengembangkan kreativitas tersebut akan mampu mendorong siswa untuk memikirkan bermacam-macam kemungkinan jawaban, bermacam-macam gagasan dalam memecahkan suatu masalah, tidak hanya satu. Ciri-ciri afektif lainnya yang penting dalam menentukan kreativitas seseorang yaitu adanya rasa ingin tahu, tertarik terhadap tugas-tugas tertentu yang dirasakan sebagai tantangan, serta berani mengambil resiko untuk membuat kesalahan atau untuk dikritik oleh orang lain, dan tidak mudah putus asa. Guru harus mampu mendorong siswa ke arah seperti itu, karena sesungguhnya bakat kreatif dimiliki oleh semua orang dan yang lebih penting lagi ditinjau dari segi pendidikan ialah bahwa kreativitas itu dapat ditingkatkan dan karena itu perlu dipupuk. Walaupun harus diakui bahwa setiap orang berbeda dalam bakat yang dimiliki serta tingkat dimilikinya bakat tersebut, tetapi masing-masing memiliki bidang yang berbeda-beda dan yang satu lebih menonjol daripada yang lain.. Walaupun setiap orang mempunyai bakat kreatif, namun kalau tidak dipupuk bakat tersebut tidak akan berkembang, bahkan bisa menjadi bakat yang terpendam, yang tidak dapat diwujudkan. Oleh karenanya menjadi kewajiban para guru untuk selalu mengembangkan daya atau bakat kreatif peserta pelatihannya. Dengan dimilikinya kreativitas ini maka seseorang akan terdorong untuk mengembangkan kemampuannya, selain dengan pembinaan kreativitas ini seseorang, didorong supaya belajar bagaimana cara untuk belajar (*learning how to learn*). Apabila siswa memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri maka siswa tersebut akan dapat selalu mengembangkan dirinya

tanpa tergantung oleh orang lain. Dari proses pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas ini dapat diharapkan bahwa seorang siswa selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungannya termasuk perkembangan teknologi maupun tuntutan kompetensi yang baru.

Pengembangan diklat berbasis kompetensi dengan penambahan kandungan kewirausahaan sebenarnya sangat diharapkan oleh pihak sekolah, walaupun dalam pelaksanaannya sekarang ini sulit dilakukan. Semangat dan jiwa kewirausahaan haruslah dipupuk, diberi contoh dan dilatihkan supaya benar-benar meresap dalam jiwa peserta didik. Dengan adanya jiwa kewirausahaan ini maka tingkat ketergantungan lulusan terhadap “majikan” akan dapat diminimalisir sehingga lulusan nanti akan dapat hidup secara mandiri dalam menerapkan, memanfaatkan dan mengembangkan kompetensinya untuk berwirausaha. Karena untuk menjadi seorang wirausahawan harus memiliki ciri-ciri adanya keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, kebutuhan terhadap kebebasan, kebutuhan adanya pembaharuan, dan adanya keinginan mencapai tingkat pendidikan yang lebih baik.

Jadi dalam upaya membina jiwa wirausaha seorang siswa harus diarahkan kepada ciri-ciri seorang wirausaha yaitu memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalankan usahanya demi mengejar suatu keuntungan, memiliki kreativitas, imajinasi di dalam mengembangkan bidang usaha yang digelutinya, memiliki cara menganalisis yang tepat, sistematis dan metodologis di dalam mengembangkan bidang usahanya, memiliki kemampuan, kemauan dan tekad bulat di dalam mengembangkan bidang usaha guna mencapai kemajuan dan tujuannya., memiliki semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan, memiliki kemampuan dalam menilai peluang dan kesempatan

serta mampu menciptakan teknik-teknik baru dalam mengorganisasi usaha-usahanya secara efektif dan efisien.

Dalam hubungannya dengan pembinaan kreativitas dan kewirausahaan ini yang patut disayangkan adalah belum dipahaminya konsep *life skill* (kecakapan hidup) oleh para guru. Walaupun guru sudah sedikit memahaminya dari media masa atau sumber lain namun dari beberapa wawancara dengan guru, pemahaman yang ada sangat minim. Sebagai contoh ada seorang guru yang mengatakan bahwa di SMK ini *life skill*-nya adalah bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan belum dipahami konsep dan pengertian maupun implementasi *life skill*. Padahal kalau guru cukup memahami konsep *life skill* ini maka akan dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran, sehingga ada pembinaan kreativitas terutama dalam menghadapi permasalahannya maupun untuk pengembangan diri di masa yang akan datang. Memang sangat mengherankan sosialisasi tentang *life skill* ini di SMK sangat kurang, walaupun di Direktorat Dikmenjur sendiri sudah ada proyek untuk sosialisasi *life skill* ini. Gaung yang ada di SMK barulah tentang diklat berbasis kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi, SMK bertaraf nasional/internasional, *community college* dan *skill testing center*. Jadi hal ini dapat menjadikan masukan bagi Direktorat Dikmenjur tentang kurangnya pemahaman mengenai *life skill* ini. Sosialisasi jangan hanya sebatas bagi para pejabat hingga kepala sekolah, namun ternyata belum sampai ke tingkat guru.

Dari pembahasan di atas nampaklah dengan adanya pola-pola pembinaan kreativitas dan kewirausahaan yang masuk dalam diklat berbasis kompetensi ini akan lebih memperkaya kemampuan siswa dalam menghadapi persaingan di dunia kerja yang sebenarnya. Apalagi pada tahun 2003 Indonesia telah memasuki era pasar bebas AFTA, yang akan lebih memperberat persaingan yang dihadapi para siswa, sehingga sekolah harus

bertanggungjawab dalam menyiapkan anak didik supaya memiliki bekal sebanyak-banyaknya dan yang bermanfaat sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya.

2. Pola pembinaan kreativitas dan kewirausahaan yang dapat dilakukan

Untuk tingkat SMK guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut untuk melatih kreativitas siswa :

- a. Mengidentifikasi macam-macam manfaat/kegunaan suatu benda. Di sini siswa diminta menjelaskan sebanyak mungkin manfaat/kegunaan sebuah benda, hingga manfaat/kegunaan yang tidak biasa.
- b. Membuat ringkasan materi, dalam hal ini siswa diberi tugas membaca dan meringkas materi menjadi beberapa kalimat, yang makin lama makin sedikit kalimatnya.
- c. Membuat kesimpulan, dengan tugas ini siswa diberi bahan bacaan berupa sebuah cerita, peristiwa, atau permasalahan kemudian diminta membuat kesimpulan atas apa yang dibacanya.
- d. Menyusun laporan pengamatan, siswa diminta mengamati suatu peristiwa atau proses kemudian diminta membuat laporan atas apa yang diamatinya.
- e. Menyusun karangan tentang pengalaman yang dimiliki, siswa diminta menyusun karangan tentang pengalaman pada masa liburan atau pada waktu tertentu yang menarik minatnya.
- f. Meniru suatu pekerjaan atau barang, di sini siswa diminta mengamati seseorang yang bekerja dan kemudian menirunya, atau membuat barang dengan meniru yang telah ada untuk kemudian memodifikasi barang tersebut dan akhirnya mampu menciptakan barang yang baru.

Untuk membina siswa ke arah ciri-ciri seorang wirausaha ini maka sekolah harus mampu melatih siswa dalam berwirausaha. Hal yang paling memungkinkan untuk SMK

adalah dengan terjun ke Unit Produksi yang seharusnya ada pada tiap SMK karena telah ada instruksi untuk mengembangkannya. Langkah-langkah yang harus diambil dalam membina kewirausahaan ini antara lain :

- a. Pada kegiatan unit produksi siswa yang selama ini hanya berfungsi sebagai teknisi atau operator dalam keterlibatannya dengan Unit Produksi, harus dirubah ke arah siswa terlibat dalam pengelolaannya. Dengan demikian pengetahuan kewirausahaan yang telah diperolehnya dalam program diklat kewirausahaan dapat diterapkan oleh siswa tersebut dalam mengelola Unit Produksi.
- b. Selama melakukan praktek pengelolaan, siswa tidak dilepaskan begitu saja, tetapi dengan bimbingan guru siswa akan menjadi terlatih untuk mengelola. Yang terjadi selama ini Unit Produksi baru digunakan sebagai tempat penampungan siswa yang tidak mendapatkan tempat prakerin, harus diubah dengan adanya program Unit Produksi merupakan satu kesatuan dalam membina kompetensi siswa dan juga membina kemampuan kewirausahaan siswa melalui praktek menjadi pengelola maupun sebagai teknisi atau operator.
- c. Untuk siswa SMK yang sekolahnya tidak memiliki atau tidak memungkinkan diselenggarakannya Unit Produksi (seperti SMK Texmaco), maka dalam upaya pembinaan kewirausahaan ini siswa dapat dilibatkan untuk prakerin di industri kecil, tetapi bukan hanya sebagai operator tetapi harus mempelajari bagaimana mengelola industri kecil tersebut. Pelibatan siswa dalam berwirausaha ini sebaiknya menjadi salah satu program resmi sekolah, karena dengan adanya pemupukan jiwa wirausaha ini akan sangat membantu siswa dalam hal berlatih berwirausaha dan selain itu juga melatih siswa untuk tidak malu-malu serta berani mengatasi masalah yang ditemui di lapangan.

E. Uji Kompetensi

a. Pembahasan

Uji kompetensi bertujuan untuk mengukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap kompetensi-kompetensi yang dipelajari selama mengikuti proses diklat. Dalam uji kompetensi ini yang penting memegang prinsip Penilaian Acuan Patokan (*Criterion Referenced Assessment*), dan yang digunakan sebagai patokan dalam hal ini adalah kriteria unjuk kerja yang ada pada standar kompetensi. Pada uji kompetensi ini penguji bertindak menjadi petugas ahli dalam membuktikan apakah seorang peserta diklat/siswa telah mencapai suatu kompetensi atau belum.

Seperti halnya semua SMK maka uji kompetensi dilakukan pada akhir tingkat tiga dan dikaitkan dengan Ujian Akhir Nasional. Bagi siswa yang mencapai nilai tujuh dalam ujian program diklat kejuruan, maka akan diberikan sertifikat kompetensi dari Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional. Untuk itu pada SMK model diklat berbasis kompetensi ini perlu dibuatkan pedoman uji kompetensi secara tersendiri, yaitu uji kompetensi dilakukan setelah siswa selesai mengikuti satu program diklat/kompetensi tertentu, jadi tidak menunggu hingga tingkat tiga. Selain itu uji kompetensi dilakukan oleh assesor dari industri, asosiasi profesi, atau badan sertifikasi. Walaupun dalam uji kompetensi selama ini telah ada penguji dari pihak industri, tetapi karena yang mengeluarkan sertifikat bukan dari industri tersebut maka penguji yang ada kurang memiliki tanggung jawab untuk menguji dengan benar, termasuk kejujuran dalam memberikan penilaian. Kondisi uji kompetensi yang terjadi selama ini harus diperbaiki karena sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip uji kompetensi pada diklat berbasis kompetensi. Karena pada diklat berbasis kompetensi uji kompetensi dilakukan bukan hanya pada akhir tingkat tiga tetapi pada tiap akhir mempelajari suatu unit kompetensi (Mick Cormick : 2000). Selain itu uji kompetensi

bukanlah sebuah keputusan final seperti yang dilakukan selama ini dengan dikaitkan Ebtanas/UAN. Selama ini uji kompetensi dilakukan sebagai sebuah keputusan final karena uji kompetensi juga merupakan sebuah ujian akhir di sekolah.

Pada saat yang akan datang SMK harus membiasakan diri untuk melakukan uji kompetensi yang meliputi pengujian kerja nyata, pengujian simulasi kerja, pengujian tertulis ataupun pengujian secara lisan. Pelaksanaan pengujian kerja nyata dilakukan di tempat kerja yang sesungguhnya, jadi berada di antara masalah-masalah sebenarnya di tempat kerja. Di sini dilakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat kerja yang memiliki situasi, peralatan, perlengkapan dan sistem yang sudah ada di tempat kerja tersebut. Jadi pengujian kerja nyata ini merupakan sebuah pengamatan dari kegiatan-kegiatan normal yang terjadi saat bekerja. Pada pengujian ini harus ada pengawasan yang baik sehingga diyakini bahwa peserta ujian mendapatkan pengalaman yang benar dan tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Penting untuk diperhatikan bahwa pengalaman di tempat kerja perlu dicatat sehingga pengalaman tersebut dapat dianalisa untuk menentukan apakah peserta diklat telah mendapatkan serangkaian pengalaman yang dibutuhkan atau belum. Format-format ujian yang digunakan harus mudah untuk digunakan dan secara langsung berhubungan dengan kompetensi. Informasi pada format ujian harus jelas karena sangat penting digunakan untuk memutuskan apakah peserta ujian/pelatihan sudah mencapai kompetensi atau belum. Bila tidak memungkinkan maka baru dilakukan pengujian simulasi kerja, seperti yang telah dilakukan selama ini. Selama ini uji kompetensi memang telah bekerja secara nyata, namun karena dalam situasi yang berbeda dengan di industri maka juga dapat dikatakan sebagai uji simulasi kerja. Hal-hal tersebut perlu diperjelas karena uji kompetensi bertujuan untuk mengukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap kompetensi-kompetensi yang dipelajari selama mengikuti proses diklat di sekolah maupun

di industri. Juga dalam pengujian kompetensi untuk di industri sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus secara formal mengadakan uji kompetensi. Karena uji kompetensi pada dasarnya dapat dilakukan secara portofolio, yaitu dengan melihat pengalaman sebelumnya dan mungkin hanya dilakukan tes sampel secara acak saja. Bahkan bila seorang pekerja sedang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, maka mungkin saja pekerja tersebut tidak perlu mengetahui bahwa dirinya sedang diamati, karena bila tahu sedang diamati maka kemungkinan justru akan menyebabkan pekerja tersebut menjadi gugup dan tidak menampilkan unjuk kerja yang sebenarnya. Dengan melihat hal ini maka juga dapat diterapkan bagi siswa terutama bila dalam mempelajari materi kompetensi telah secara langsung bekerja di industri atau Unit Produksi dengan menghasilkan produk tertentu. Dengan mengamati penampilannya serta hasil produk yang dibuatnya maka dapat dilakukan penilaian apakah seorang siswa telah memenuhi syarat diberikan sertifikasi atau belum.

b. Pola pengelolaan uji kompetensi yang dapat dilakukan

Pada pelaksanaan uji kompetensi seharusnya tersedia beberapa hal di bawah ini yang akan memudahkan panitia melakukan uji kompetensi, yaitu:

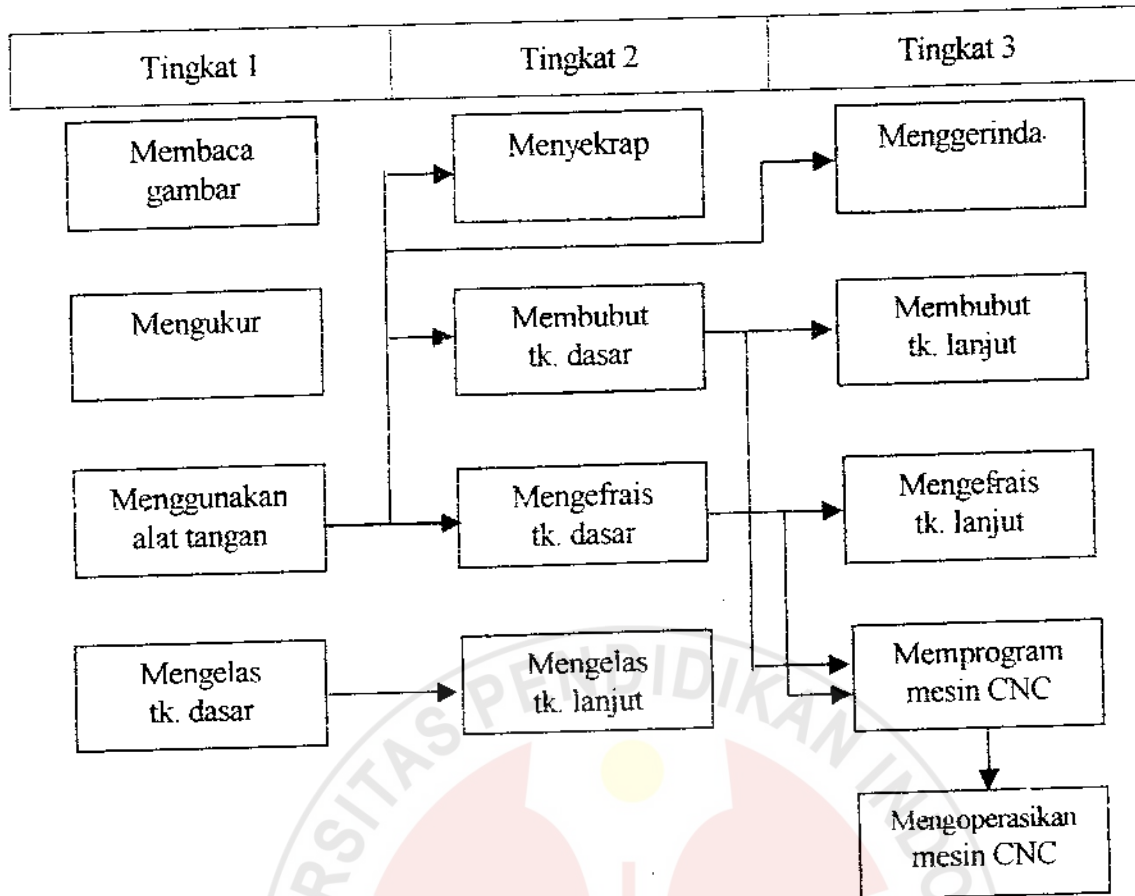
- 1) Tersedia pedoman pelaksanaan uji kompetensi yang menjelaskan sistem, mekanisme dan prosedur pelaksanaan uji kompetensi.
- 2) Tersedia format, soal dan instrumen penilaian uji kompetensi yang standar berdasarkan karakteristik diklat berbasis kompetensi.
- 3) Tersedia obyek uji kompetensi (fasilitas praktek atau *simulator* atau *trainer*) dalam kondisi baik.

- 4) Tersedia panitia dan tenaga pelaksana uji kompetensi (assessor) dari sekolah dan/atau dari pihak industri/Kadin atau instansi resmi lain.

Dengan dasar pemahaman di atas maka uji kompetensi yang dilakukan di lembaga pelatihan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Setiap selesai mempelajari satu kompetensi, peserta pelatihan dapat diuji atas kompetensi yang telah dipelajarinya, jadi tidak perlu menunggu di akhir masa belajar.
- 2) Uji kompetensi dilakukan setelah peserta pelatihan mempelajari beberapa kompetensi, dan yang diujikan adalah kompetensi yang telah dikuasai peserta pelatihan.
- 3) Uji kompetensi dilakukan pada akhir masa belajar, dan yang diujikan adalah semua kompetensi yang dikuasai peserta pelatihan.
- 4) Penilaian atau ujian dapat dilakukan secara tertulis, wawancara, simulasi atau kerja nyata, sejauh sesuai dengan tuntutan standar kompetensi.
- 5) Bagi siswa yang belum lulus uji kompetensi harus diberi kesempatan untuk belajar kembali kemudian mengikuti uji ulang bila merasa sudah mampu atau sudah menguasai kompetensi yang akan diujikan.
- 6) Penilai atau penguji adalah personil dari industri, asosiasi profesi/industri/badan sertifikasi.
- 7) Pelaksana uji kompetensi adalah sebuah panitia yang disahkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengesahkan.

Pola uji kompetensi yang dilakukan pada tiap tingkat dapat digambarkan dalam diagram berikut :



Gbr. 11 : Uji kompetensi yang dapat dilakukan pada tiap tingkat di SMK

Dengan pola pengujian seperti di atas maka pada tingkat satupun siswa telah memiliki sertifikat kompetensi bagi yang telah menguasai suatu kompetensi. Selain itu dengan pola ini bagi siswa yang belum lulus dapat mengulang uji kompetensi karena siswa tersebut belum keluar dari sekolah tersebut. Tidak seperti yang berjalan selama ini, pada saat siswa tidak lulus uji kompetensi maka sudah tidak dapat mengulang karena sudah tamat atau sudah keluar dari SMK tersebut (walaupun siswa tidak lulus uji kompetensi tetapi tetap lulus/tamat dari SMK karena nilai program diklat yang lain cukup baik).



F. Sertifikasi bagi Siswa/Peserta Diklat

1. Pembahasan

Hasil peningkatan kompetensi dapat dilihat dari sertifikasi atau pengakuan terhadap penguasaan kompetensi oleh siswa yang diberikan oleh Panitia Pelaksana Uji Kompetensi dari asosiasi/lembaga nasional (Kadin). Ketentuan-ketentuan mengenai proses sertifikasi di sekolah diantaranya adalah :

1. Sertifikasi diberikan hanya kepada siswa yang berhasil mengikuti uji kompetensi (nilai UAN kejuruan lebih dari 7).
2. Sertifikasi dikeluarkan atau disampaikan oleh panitia penyelenggara uji kompetensi dari asosiasi atau lembaga nasional (Kadin/MPKN).

Dari hasil uji kompetensi yang ada terlihat bahwa hasil kelulusan tahun 2000/2001 dan 2001/2002 pada SMK Negeri (cenderung lebih tinggi dari pada dari SMK swasta, walaupun SMK swasta tersebut langsung praktek di industri seperti pada SMK Texmaco Karawang dan memiliki fasilitas belajar yang sangat baik seperti pada SMK YPPT Garut). Namun menurut informasi yang ada sebelum tahun 2000 (jadi sebelum kurikulum SMK edisi 1999), jumlah kelulusan juga berkisar pada jumlah seperti di atas. Jadi ternyata dengan adanya diklat berbasis kompetensi ini belum banyak merubah hasil peningkatan kompetensi. Ini menjelaskan bahwa tanpa adanya perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu adanya standar pencapaian serta menganut pada belajar tuntas seperti tuntutan diklat berbasis kompetensi, maka hasil diklat akan tetap sama saja, yang hasilnya lebih banyak tergantung pada raw input/siswanya. Bila siswa yang masuk memiliki kualitas yang baik maka hasilnya tetap akan baik walaupun tanpa proses dan faktor pendukung yang memadai seperti terlihat pada SMKN 2 Serang. Sedangkan bila siswa yang masuk tidak terseleksi dengan baik seperti di SMK YPPT Garut, walaupun proses dan faktor pendukung cukup

memadai maka hasilnya pun tidak akan optimal. Tetapi perlu juga dipahami bahwa sebenarnya sampai tahun 2002, hasil diklat berbasis kompetensi belum dapat sepenuhnya dilihat karena baru meluluskan satu angkatan, namun hendaknya dari hasil sampai tahun 2002 ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk benar-benar menerapkan prinsip diklat berbasis kompetensi di SMK, khususnya dalam penerapan prinsip belajar tuntas..

Seperti halnya uji kompetensi, sertifikasi pada ke empat SMK model juga dilakukan sesuai dengan aturan dari Departemen/Dinas. Sebagian siswa yang belum berhasil memperoleh sertifikasi standar tidak mengikuti kembali uji kompetensi. Siswa yang belum berhasil dalam uji kompetensi nasional kepada mereka diberikan Surat Keterangan telah mengikuti uji kompetensi dari sekolah.

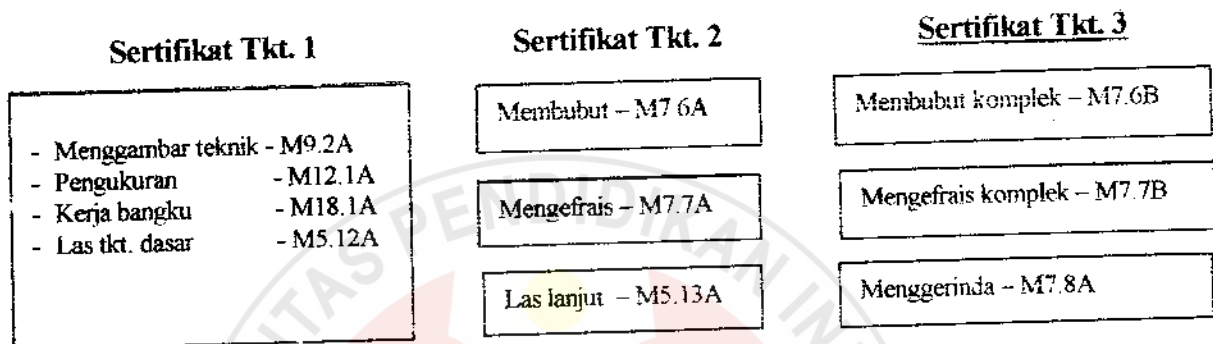
Untuk pelaksanaan ke depan maka seharusnya siswa-siswa yang belum berhasil memperoleh sertifikat kompetensi supaya dapat mengikuti kembali uji kompetensi, hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi yang menerapkan konsep belajar tuntas dengan pola *remedial*. Untuk itu surat keterangan yang dibuat sekolah untuk siswa yang belum lulus uji kompetensi supaya mencantumkan jumlah dan jenis unit kompetensi yang diuji, elemen atau sub kompetensi yang belum lulus, sehingga pada saat uji ulang siswa hanya diuji pada elemen atau sub kompetensi yang belum lulus kecuali bila sub kompetensi yang belum lulus ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sertifikat kompetensi yang diberikan kepada siswa hendaknya juga dari lembaga yang menguji sehingga penguji akan memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menguji dengan benar. Dengan adanya pengembangan dalam hal sertifikasi ini maka pada waktu yang akan datang perlu ditetapkan panitia atau petugas khusus dalam menangani masalah sertifikasi ini. Dalam hal sertifikasi ini juga harus diatur beberapa hal yang mungkin dipandang baru, karena berbeda dengan yang dilakukan selama ini.

Yang perlu disadari oleh para pimpinan dan para guru, sertifikasi ini adalah juga sebagai pembuktian atas hasil belajar siswa selama mempelajari materi kompetensi. Untuk itu setelah seorang siswa mengikuti diklat maka diharapkan terjadi peningkatan kompetensi kejurumannya. Dari hasil uji kompetensi maka akan dapat diketahui bahwa hasil peningkatan kompetensi kejuruan bergantung pada beberapa hal, seperti kemampuan intelektual dan bakat keterampilan siswa, jadi siswa yang masuk seharusnya memenuhi syarat kemampuan intelektual dan fisik tertentu. Faktor kemampuan awal siswa ini penting karena akan menentukan hasil pembelajaran selanjutnya. Untuk mewujudkan hasil yang baik ini sekolah tentu saja juga harus menyiapkan faktor lain sebagai *instrumental input* seperti kurikulum, guru, peralatan, metoda, media, bahan ajar serta bangunan. *Instrumental input* tentunya harus memadai supaya dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini penting sekali karena tanpa adanya proses yang baik maka walaupun *instrumental input* baik, hasilnya tidak akan baik pula. Jadi sertifikasi sebagai pembuktian atas penguasaan siswa terhadap kompetensi yang dipelajari ini tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas pembuktian pada akhir pembelajaran saja, tetapi yang utama juga harus diperhatikan adalah proses dalam mencapai sertifikasi ini. Sehingga dengan proses pembelajaran yang baik ini akan dapat mengisi kelemahan diklat berbasis kompetensi yang cenderung hanya menekankan pada hasil kompetensi yang dikuasai saja.

2. Pola sertifikasi yang dapat dilakukan

Seharusnya dalam satu sertifikat dapat menyatakan penguasaan atas satu kompetensi atau beberapa kompetensi sekaligus. Hal itu berkenaan dengan pola uji kompetensi yang seharusnya tidak hanya dilakukan pada akhir tingkat 3. Dan dalam sistem sertifikasi ini khususnya untuk tingkat 1 SMK, hendaknya satu sertifikasi merupakan satu kesatuan atau rangkaian kompetensi yang utuh dan dapat digunakan dalam menangani

suatu pekerjaan tertentu. Untuk itu pada tingkat 1 maka satu sertifikat hendaknya tidak hanya berisi satu kompetensi tetapi merupakan satu kesatuan utuh yang dapat digunakan untuk bekerja di masyarakat/industri. Untuk tingkat 2 dan tingkat 3, sertifikat kompetensi dapat berisi satuan unit kompetensi karena mulai tingkat 2 tiap satu unit kompetensi mengacu pada satu profesi tertentu.

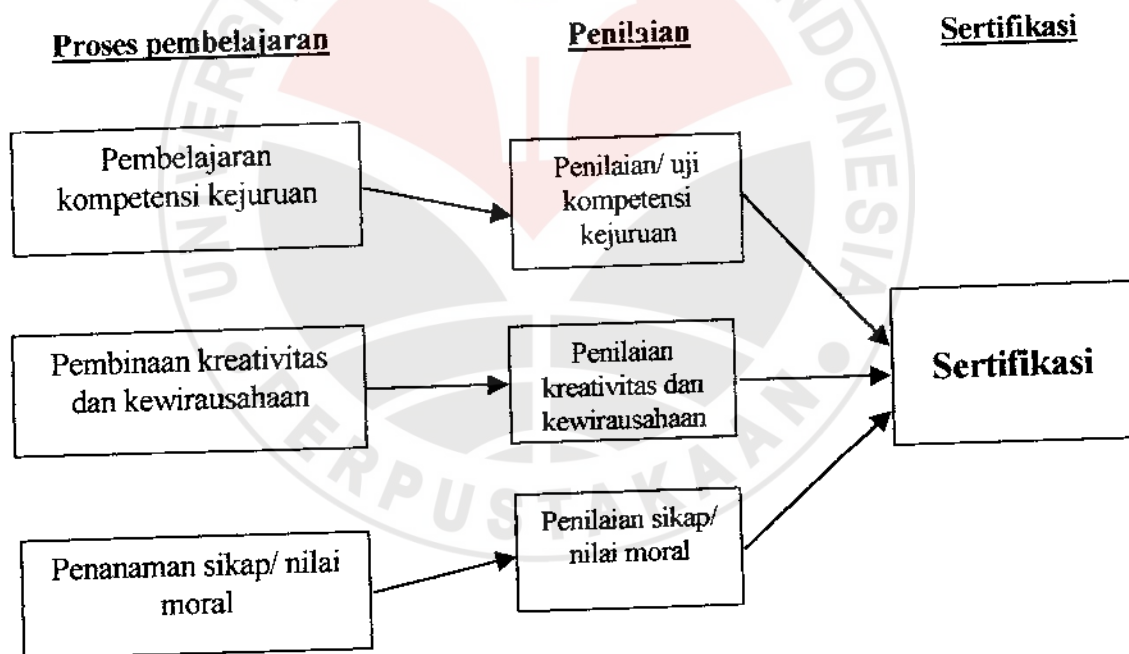


Gbr. 12 : Sertifikat pada tiap tingkat

Dengan satu kesatuan kompetensi ini apabila seorang siswa mengalami dropout, maka dengan bekal sertifikat ini siswa dapat mencari pekerjaan, jadi sertifikat ini dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk mengetahui kompetensi yang telah dikuasai siswa tersebut, tentu saja perusahaan/industri akan mempercayai apa yang tertera pada sertifikat tersebut apabila lembaga yang menerbitkan sertifikat itu adalah sebuah lembaga yang diakui dan dipercaya oleh kalangan perusahaan/industri.

Selanjutnya perlu disosialisasikan bahwa sebenarnya sertifikasi ini bukanlah tujuan dari diklat berbasis kompetensi kejuruan ini, tetapi yang penting dan utama adalah penguasaan kompetensi oleh siswa yang sesuai dengan standar yang berlaku dan diakui oleh lapangan kerja. Untuk itu walaupun diklat berbasis kompetensi sangat menekankan pada hasil akhir tetapi proses pencapaian kompetensi ini juga tidak dapat dilupakan, apalagi

diklat ini berlangsung di sekolah, di mana selain pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari maka yang lebih penting lagi adalah sistem dan tata nilai yang dipelajari dan menjadi landasan dalam tingkah laku sehari-hari. Jadi masalah pendidikan moral, keteladanan dan bimbingan terhadap sikap harus tetap diperhatikan oleh pimpinan sekolah maupun para guru. Selain itu itu pembinaan kreativitas dan kewirausahaan perlu sekali ditekankan pada proses pembelajaran di sekolah sehingga selain siswa memiliki kompetensi kejuruan juga memiliki kreativitas, dan jiwa wirausaha. Dengan demikian hasil belajar siswa jangan hanya dilihat dari sertifikasi yang dapat dicapai siswa tetapi juga hasil perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, lebih mandiri untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hidupnya.



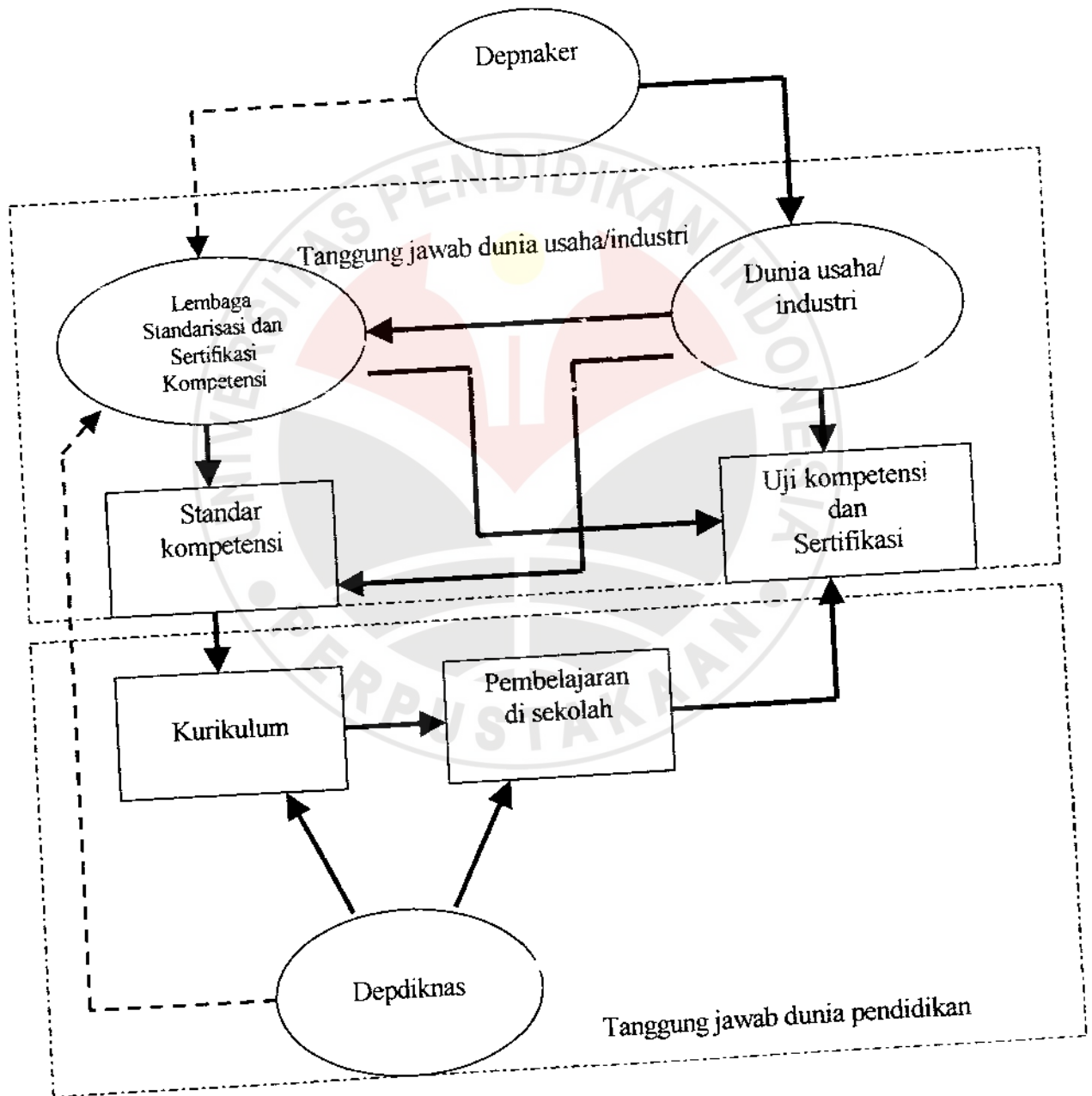
Gbr. 13 : Kaitan antara proses pembelajaran, penilaian dan sertifikasi

Selanjutnya dengan sertifikasi ini diharapkan pihak eksternal sekolah akan mengakui eksistensi serta nilai sertifikasi tersebut, baik sertifikasi yang dilakukan pada tiap

kompetensi, jenjang atau akhir belajar di SMK. Untuk mencapai hal ini harus ada upaya yang bersifat menyeluruh dari awal proses hingga akhir proses. Dari awal proses yaitu penetapan standar kompetensi yang dijadikan acuan, harus sudah dilakukan dengan tetap melalui persiapan yang matang, yang meliputi acuan standar kompetensi yang dikenal, dimiliki, diakui serta juga dijadikan acuan oleh industri pada bidang yang sesuai dengan program keahlian di SMK. Kemudian pada saat pengelolaan pembelajaran di sekolah, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selalu dilakukan sosialisasi ke masyarakat/dunia usaha/industri sehingga mereka memahami apa yang terjadi di sekolah, sehingga mereka bisa diharapkan memberikan masukan bila dirasakan tidak sesuai dengan harapan mereka. Dengan adanya hubungan timbal balik ini maka masyarakat akan ikut merasa memiliki sekolah. Kegiatan di sekolah ini sepenuhnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan karena ini merupakan bisnis inti lingkup pendidikan, maka pihak-pihak penanggung jawab pendidikan harus memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan secara umum dan sekolah pada khususnya. Pada bagian akhir yaitu evaluasi, yang meliputi uji kompetensi dan sertifikasi, sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau pola yang berlaku di dunia usaha/industri. Jadi pola uji kompetensi dan sertifikasi ini pihak sekolah/pendidikan hendaknya tidak memaksakan sistemnya sendiri, karena kalau sistem yang dipaksakan ini ternyata tidak sesuai dengan pola dunia usaha/industri maka pada akhirnya sertifikat yang diberikan juga tidak akan diakui oleh dunia usaha/industri tersebut.

Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa pola uji kompetensi dan sertifikasi ini harus juga diterapkan secara menyeluruh pada sistem ketenagakerjaan secara nasional. Karena walaupun SMK sudah berhasil dengan sistem diklat berbasis kompetensinya yang diantaranya ditandai dengan uji kompetensi dan sertifikasi, tetapi pihak dunia usaha/industri

tidak menerapkan sistem ini maka sertifikat yang sudah secara susah payah diperoleh siswa ini menjadi tidak ada artinya. Jadi sistem diklat berbasis kompetensi ini juga didukung oleh sejumlah aturan ketenagakerjaan yang mengharuskan adanya uji kompetensi dan sertifikat dari pihak yang berwenang, sebagai syarat diterima bekerja di sebuah perusahaan. Jadi secara keseluruhan pola diklat berbasis kompetensi ini dapat digambarkan di bawah ini yang sekaligus juga menggambarkan kaitannya dengan pihak luar sekolah.



Gbr. 14 : Lingkup tanggung jawab dunia usaha/industri dan dunia pendidikan

**Tabel 18 : RANGKUMAN KESIMPULAN TEORITIS, KESIMPULAN LAPANGAN DAN KESIMPULAN AKHIR
DALAM PENGELOLAAN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DI SMK**

No	Kesimpulan teoritis	Kesimpulan lapangan	Kesimpulan Akhir
1.	<p>Pengelolaan diklat berbasis kompetensi secara umum</p> <p>a. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen terhadap program-program untuk mencapai tujuan organisasi.</p> <p>b. Seorang pemimpin di sebuah sekolah harus memiliki keseriusan dalam melengkap dan merawat fasilitas belajar di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang baik.</p>	<p>Pengelolaan Diklat Berbasis Kompetensi secara umum</p> <p>a. Pimpinan sekolah umumnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan penerapan diklat berbasis kompetensi.</p> <p>b. Pimpinan sekolah umumnya cukup serius untuk melengkap dan merawat fasilitas pembelajaran, hambatan yang ditemui adalah kurangnya dana.</p>	<p>Pengelolaan diklat berbasis kompetensi secara umum</p> <p>a. Pimpinan sekolah umumnya sudah menyadari pentingnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan penerapan diklat berbasis kompetensi. Tanpa komitmen yang kuat maka diklat berbasis kompetensi akan sulit terlaksana.</p> <p>b. Pimpinan sekolah umumnya juga sudah menunjukkan keseriusannya dalam melengkap dan merawat fasilitas pembelajaran, walaupun terdapat hambatan dalam hal kekurangan dana untuk melengkap dan merawat fasilitas belajar.</p>